



**PETA JALAN  
PEMBERANTASAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU NASIONAL  
Tahun 2023-2035**



**Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si  
NDH 43**

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II  
PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP)  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

2022



**LAPORAN PROYEK PERUBAHAN**

**PETA JALAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)**

**NASIONAL TAHUN 2023 – 2035**

**(PELABAS PMK)**

DISUSUN OLEH : NURYANI ZAINUDDIN  
NIP : 197608262003122001  
UNIT KERJA : DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN,  
DIREKTORAT JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESWAN  
NO. PESERTA : 43

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONALTINGKAT II ANGGKATAN XX  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI  
CIAWI, DESEMBER 2022

## LEMBAR PENGESAHAN

### PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

Judul : Peta Jalan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional  
Tahun 2023-2035. (*Pelabas PMK*)

Nama : Nuryani Zainuddin

NIP : 197608262003122001

Unit Kerja : Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jendral Peternakan dan  
Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian

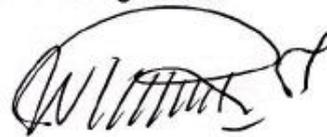
Telah diuji di depan Penguji pada hari Rabu tanggal 23 November 2022.

Mentor



Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc  
NIP.196602231993031001

Pembimbing/Coach



Dr. Wahyu Suprapti, MM  
NIP. 196107111985032001

Penguji



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc  
NIP. 196802251993032002

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan taufik-Nya, laporan proyek perubahan Peta Jalan Pemberantasan Penyakit Mulut Kuku (PMK) Nasional Tahun 2023-2035 (*PELABAS PMK*) dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan proyek perubahan ini disusun sebagai salah satu syarat dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XX tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), pada tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 24 November 2022 di Ciawi Bogor atas kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara RI.

Melalui laporan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proyek perubahan ini, diantaranya kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sekaligus sebagai Mentor, Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc., sebagai Pembimbing (*Coach*) Dr. Wahyu Suprpti, MM., M.Psi-T dan Penguji Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc, serta para Widyaiswara dan Narasumber sekalian, Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian beserta jajarannya, Keluarga Besar Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Rekan-rekan peserta PKN Tingkat II Angkatan XX tahun 2022 yang telah bersama-sama dalam suasana diklat yang penuh warna, serta tentunya keluarga yang selalu memberikan keceriaan dan penyemangat hidup, dan semua pihak yang telah membantu selama mengikuti diklat dan penyusunan proyek perubahan. Semoga laporan ini bisa memberikan nilai manfaat bagi semua.

Semoga laporan ini bisa memberikan nilai manfaat semua.

Jakarta, 24 November 2022

Penulis,

Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Peta Jalan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional tahun 2023-2035 menuju Indonesia Bebas PMK disusun berdasarkan analisis sebaran dan dampak PMK yang terjadi saat ini, analisis terhadap penanggulangan PMK yang telah dilakukan serta *best practices* pengendalian PMK yang dilakukan oleh negara lain. Analisis sebaran dan dampak PMK saat ini memaparkan sejarah PMK di Indonesia, mulai dari pertama kali terkena PMK kemudian dinyatakan bebas PMK hingga terkena PMK Kembali pada April tahun 2022. Selain itu, analisis sebaran dan dampak PMK saat ini juga menggambarkan kondisi PMK terkini, baik secara global, regional (asia pasifik) maupun kondisi PMK terkini di Indonesia.

Analisis sebaran dan dampak PMK saat ini dilakukan dengan metode studi dokumentasi (*desk research*) berdasarkan dokumen atau berita resmi yang dikeluarkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH), badan kesehatan hewan Asia Pasifik dan China (SEAC-FMD) maupun Direktorat Jenderal PKH, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Analisis ini juga melibatkan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pakar peternakan dan kesehatan hewan untuk mengetahui sebaran dan dampak PMK yang terjadi di Indonesia. Untuk analisis sebaran dan dampak PMK saat ini di Indonesia, dilakukan juga analisis dampak sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan akibat munculnya PMK. Analisis dampak ini dilakukan dengan metode *indepth interview* dengan organisasi maupun asosiasi peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia, meliputi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI), Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI), Ikatan Sarjana Peternak Indonesia (ISPI), Paramedik Veteriner Indonesia (Paravetindo), Ikatan Paramedik Veteriner Indonesia (IPAVETI), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), Asosiasi Dokter Hewan Monogastrik Indonesia (ADHMI), Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI) dan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI). Selain itu, *indepth interview* kepada peternak kecil, menengah dan besar di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Hasil *indepth interview* dianalisis menggunakan *pattern analysis* dan

*hermeneutics analysis* untuk melihat konsistensi pola jawaban yang sama, baik konteks maupun substansinya.

Analisis berikutnya adalah analisis penanggulangan PMK yang telah dilakukan saat ini dari berbagai perspektif. Analisis ini meliputi kegiatan penanggulangan yang telah dilaksanakan hingga kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, Satuan Tugas (Satgas) PMK maupun lembaga terkait sehubungan dengan pengendalian PMK selama wabah PMK terjadi di Indonesia. Analisis penanggulangan PMK saat ini dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumentasi (*desk research*) berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (Ditjen PKH) maupun Satgas PMK. Analisis ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengendalian PMK telah dilakukan, sehingga strategi pemberantasan PMK yang diformulasikan tidak mulai dari awal.

Analisis berikutnya adalah studi banding terhadap pengendalian PMK yang dilakukan oleh negara lain, meliputi Australia, New Zealand, Paraguay, Uruguay, Brazil, Kazakhstan, Jepang dan Uni Eropa (regional). Analisis ini menggunakan metode studi dokumentasi (*desk research*) dan *deeph interview* pengendalian PMK di negara-negara tersebut kemudian mengambil *lesson learned* untuk pengendalian PMK di Indonesia.

Strategi Pemberantasan PMK disusun berdasarkan *the global Foot and Mouth Disease strategy* yang dikeluarkan oleh organisasi Kesehatan hewan dunia (WOAH) yang didalamnya terdapat panduan pengendalian PMK secara bertahap yaitu *Progressive Control Pathway Foot and Mourh Disease* (PCP-FMD) serta penguatan layanan veteriner dalam mendukung pengendalian PMK yaitu *Performance of Veterinary Services* (PVS). Strategi Pemberantasan PMK juga divalidasi oleh pakar kesehatan hewan maupun peternakan melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil formulasi strategi kemudian dijabarkan menjadi kerangka logis Peta Jalan Pemberantasan PMK nasional tahun 2023-2035, visi, misi, strategi, kegiatan hingga rencana aksi pemberantasan PMK.

Berdasarkan analisis dan FGD yang telah dilakukan, maka kerangka logis pemberantasan PMK yang digambarkan dalam rumah strategi pemberantasan PMK (Gambar 1) memiliki tujuan akhir yaitu Indonesia Bebas PMK. Tujuan

antara yang harus dicapai dalam mewujudkan Indonesia Bebas PMK adalah (1) Indonesia bebas PMK tanpa Vaksinasi, yang akan tercapai jika tujuan antara sebelumnya tercapai yaitu (2) Indonesia bebas PMK dengan vaksinasi, dan akan tercapai jika tujuan antara sebelumnya tercapai yaitu (3) Zona/wilayah di Indonesia bebas PMK.



Gambar 1. Kerangka Strategis Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional Tahun 2023 – 2035

Tujuan akhir maupun tujuan antara ini akan dicapai melalui 8 (delapan) pilar strategis, meliputi (1) Pilar 1: Vaksin dan Vaksinasi PMK, (2) Pilar 2: Pemantauan secara terus menerus terhadap PMK (*surveilans*); (3) Pilar 3: *Biosecurity* dan pembatasan pergerakan hewan rentan PMK; (4) Pilar 4: Kesiapsiagaan dan tanggap darurat PMK; (5) Pilar 5: Pemulihan produksi dan produktivitas ternak pasca terkena PMK; (6) Pilar 6: Penanganan dampak sosio-ekonomi PMK khususnya bagi peternak rakyat; (7) Pilar 7: Koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder, dalam dan luar negeri; dan ketujuh pilar tersebut akan diikat oleh pilar berikutnya yaitu (8) Pilar 8: Meningkatkan *awareness* stakeholder tentang pengendalian PMK. Kedelapan pilar strategis tersebut ditopang oleh pondasi yang merepresentasikan *supporting system* dalam mendukung pemberantasan

PMK. *Supporting system* ini berfungsi sebagai *enabler* dan akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan 8 pilar strategis yang telah dijabarkan sebelumnya. *Supporting system* yang dimaksud adalah (1) *Official Control Program – Foot and Mouth Diseases (OCP-FMD)*, (2) *Risk Assessment Plan* dan *Risk-based strategic planning*, (3) Sistem Kesehatan Hewan Nasional dalam rangka memperkuat *Veterinary Services (VS)*, (4) Penguatan SDM Tenaga Kesehatan Hewan dan paraprofesional veteriner, (5) Penelitian dan pengembangan terapan (*applied research*) terkait pemberantasan PMK, (6) Regulasi pemberantasan PMK, (7) Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung digitalisasi pemberantasan PMK, dan (8) Anggaran pemberantasan PMK dan penguatan VS.

## Dokumen Proyek Perubahan

Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si.

Direktur Kesehatan Hewan,  
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kementerian Pertanian

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional  
Tingkat II Angkatan XX  
2 Agustus 2022 - 24 November 2022

Dokumen elektronik pada:

## DAFTAR ISI

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN .....	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
KATA PENGANTAR .....	4
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	5
Dokumen Proyek Perubahan .....	9
DAFTAR ISI .....	10
DAFTAR TABEL .....	11
DAFTAR GAMBAR .....	11
BAB I.....	17
RENCANA PROYEK PERUBAHAN.....	17
A. LATAR BELAKANG .....	17
B. Referensi.....	21
C. TUJUAN DAN MANFAAT.....	26
D. KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> ) DAN HASIL ( <i>OUTCOME</i> ) .....	29
E. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS .....	30
F. RENCANA STRATEGIS MARKETING .....	35
G. POTENSI KENDALA DAN RENCANA SOLUSI.....	38
H. Tim Efektif .....	41
I. ANGGARAN.....	42
BAB II.....	43
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN.....	43
II.A. Capaian Hasil Rencana Perubahan dan Manfaat Proyek Perubahan.....	43
II.B. Kepemimpinan Strategis .....	66
II.C. Implementasi Strategi Marketing.....	73
II.D. Keberlanjutan Proyek Perubahan .....	78
II.E. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran ( <i>Learning Organization</i> ) .....	82
II.F Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan Dengan Proyek Perubahan Optimalisasi.....	85
BAB III.....	88
PENGEMBANGAN POTENSI DIRI.....	88
BAB IV.....	95
PENUTUP .....	95
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN.....	99

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1</b> : Sasaran jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang	<b>31</b>
<b>Tabel 2</b> : Hasil identifikasi <i>Stakeholder</i> Internal dan <i>Stakeholder</i> Eksternal	<b>35</b>
<b>Tabel 3</b> : Potensi risiko dan mitigasi risiko rencana proses proyek perubahan	<b>38</b>
<b>Tabel 4</b> : Potensi risiko dan mitigasi risiko proyek perubahan	<b>40</b>
<b>Tabel 5</b> : Anggaran pelaksanaan kegiatan proyek perubahan tahunan	<b>42</b>
<b>Tabel 6</b> : Kegiatan implementasi proyek perubahan peta jalan pemberantasan PMK Nasional	<b>43</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1</b> : Kerangka strategis Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional Tahun 2023 – 2035	<b>7</b>
<b>Gambar 2</b> : Kerugian ekonomi akibat penyakit PMK	<b>18</b>
<b>Gambar 3</b> : Pernyataan Presiden RI terkait wabah PMK	<b>19</b>
<b>Gambar 4</b> : Data PMK melalui <a href="http://www.siagapmk.crisis-center.id">www.siagapmk.crisis-center.id</a>	<b>21</b>
<b>Gambar 5</b> : Prinsip pengendalian PMK	<b>23</b>
<b>Gambar 6</b> : Perubahan status PMK Indonesia berdasarkan WOAHA pada Januari dan Mei 2022	<b>24</b>
<b>Gambar 7</b> : <i>Progressive Control Pathway</i> (PCP) PMK dalam pengendalian PMK	<b>25</b>
<b>Gambar 8</b> : Analisis lingkungan strategis SOAR	<b>30</b>

<b>Gambar 9</b>	: Hasil analisis peta <i>Stakeholder</i>	<b>36</b>
<b>Gambar 10</b>	: Strategi <i>marketing</i>	<b>37</b>
<b>Gambar 11</b>	: Strategi pembebasan PMK	<b>43</b>
<b>Gambar 12</b>	: Surat Keputusan Direktorat Kesehatan Hewan	<b>48</b>
<b>Gambar 13</b>	: <i>Kick off- meeting</i>	<b>48</b>
<b>Gambar 14</b>	: Undangan pengambilan data <i>Stakeholder</i>	<b>49</b>
<b>Gambar 15</b>	: Dokumentasi pengumpulan analisis data sekunder	<b>50</b>
<b>Gambar 16</b>	: Kegiatan FGD dengan pakar	<b>50</b>
<b>Gambar 17</b>	: FGD dampak bagi asosiasi	<b>51</b>
<b>Gambar 18</b>	: Undangan pemetaan kebijakan	<b>52</b>
<b>Gambar 19</b>	: Dokumentasi pemetaan kebijakan	<b>53</b>
<b>Gambar 20</b>	: Analisis penanggulangan PMK pada negara menuju bebas PMK (Brazil)	<b>53</b>
<b>Gambar 21</b>	: Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan SEACFMD	<b>54</b>
<b>Gambar 22</b>	: Analisis penanggulangan PMK pada negara menuju bebas PMK (New Zealand)	<b>55</b>
<b>Gambar 23</b>	: Dokumentasi Penyusunan Roadmap	<b>56</b>
<b>Gambar 24</b>	: Proses wawancara dengan peternak	<b>57</b>
<b>Gambar 25</b>	: Identifikasi dan analisis standar internasional PMK	<b>58</b>
<b>Gambar 26</b>	: Validasi strategi penanggulangan PMK	<b>59</b>
<b>Gambar 27</b>	: <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) pemberantasan PMK	<b>60</b>
<b>Gambar 28</b>	: <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) Peta jalan pemberantasan PMK	<b>61</b>
<b>Gambar 29</b>	: <i>Draft</i> final penyusunan Peta Jalan Pemberantasan PMK	<b>62</b>
<b>Gambar 30</b>	: Sosialisasi Peta Jalan Pemberantasan PMK	<b>63</b>
<b>Gambar 31</b>	: Diagram kuisisioner terkait pemahaman koresponden terhadap PMK	<b>64</b>

<b>Gambar 32</b>	: Diagram kuisisioner terkait dampak PMK	<b>65</b>
<b>Gambar 33</b>	: Diagram kuisisioner terkait dampak PMK	<b>65</b>
<b>Gambar 34</b>	: Tata Kelola proyek perubahan	<b>66</b>
<b>Gambar 35</b>	: Konferensi pers Presiden RI terkait wabah PMK	<b>68</b>
<b>Gambar 36</b>	: Pernyataan dari menteri pertanian terkait adanya wabah PMK	<b>68</b>
<b>Gambar 37</b>	: Konsultasi terkait proyek perubahan peta jalan pemberantasan PMK Nasional dengan Mentor selaku Dirjen PKH	<b>68</b>
<b>Gambar 38</b>	: Proses diskusi bersama <i>coach</i> Dr. Wahyu Suprpti, MM., M.Psi-T mengenai penyusunan proyek perubahan	<b>69</b>
<b>Gambar 39</b>	: Konsultasi dan koordinasi dengan presiden OIE/WOAH Pada kongres <i>7<sup>th</sup> One Health</i> untuk pengendalian PMK	<b>69</b>
<b>Gambar 40</b>	: Konsultasi terkait penanganan PMK dengan Mantan Dirjen PKH	<b>70</b>
<b>Gambar 41</b>	: Kunjungan kerja bersama wakil Gubernur Sumatera Barat untuk berkoordinasi dan berkonsultasi terkait strategi pemberantasan PMK	<b>70</b>
<b>Gambar 42</b>	: Kunjungan kerja dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi pengendalian PMK	<b>71</b>
<b>Gambar 43</b>	: Testimoni komisi ahli kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan karantina hewan terkait penyusunan peta jalan pemberantasan PMK	<b>71</b>
<b>Gambar 44</b>	: Testimoni <i>Animal Health Adviser</i> AIHSP terkait penyusunan peta jalan pemberantasan PMK	<b>72</b>

<b>Gambar 45</b>	: Testimoni dari <i>sub regional representative</i> OIE/WOAH terkait penyusunan peta jalan pemberantasan PMK Nasional	<b>72</b>
<b>Gambar 46</b>	: Testimoni dari koordinator FMD Nasional (Malaysia)	<b>73</b>
<b>Gambar 47</b>	: Bagan implementasi strategi <i>marketing</i> 4C 1C	<b>75</b>
<b>Gambar 48</b>	: Buku <i>roadmap</i> pemberantasan PMK	<b>76</b>
<b>Gambar 49</b>	: Surat keputusan Menteri Pertanian	<b>77</b>
<b>Gambar 50</b>	: Peta perubahan <i>stakeholder</i>	<b>77</b>
<b>Gambar 51</b>	: Surat dukungan untuk proyek perubahan peta jalan pemberantasan PMK Nasional dari Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	<b>78</b>
<b>Gambar 52</b>	: Surat Dukungan untuk proyek perubahan peta jalan pemberantasan PMK Nasional dari Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner	<b>79</b>
<b>Gambar 53</b>	: Surat Dukungan untuk proyek perubahan peta jalan pemberantasan PMK Nasional dari <i>Partnership Government Food Agriculture Organization</i>	<b>79</b>
<b>Gambar 54</b>	: Surat dukungan untuk proyek perubahan peta jalan pemberantasan PMK Nasional dari Direktur Pakan	<b>80</b>
<b>Gambar 55</b>	: Surat dukungan untuk proyek perubahan peta jalan pemberantasan PMK Nasional dari Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak	<b>80</b>
<b>Gambar 56</b>	: Surat dukungan untuk proyek perubahan peta jalan pemberantasan PMK Nasional dari Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	<b>81</b>
<b>Gambar 57</b>	: Surat dukungan untuk proyek perubahan peta jalan pemberantasan PMK Nasional dari	<b>81</b>

	Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	
<b>Gambar 58</b>	: Surat dukungan untuk proyek perubahan peta jalan pemberantasan PMK Nasional dari <i>Australia Indonesia Health Partnership</i>	<b>82</b>
<b>Gambar 59</b>	: Membangun komunikasi dengan staff	<b>84</b>
<b>Gambar 60</b>	: Koordinasi dengan para eselon 2	<b>84</b>
<b>Gambar 61</b>	: Membangun koordinasi dengan staff	<b>85</b>
<b>Gambar 62</b>	: Penyamaan visi, misi dan tujuan tim	<b>85</b>
<b>Gambar 63</b>	: Rekap nilai gabungan peserta dan mentor	<b>88</b>
<b>Gambar 64</b>	: Rekap nilai akhir sikap perilaku peserta	<b>88</b>
<b>Gambar 65</b>	: Bersama wakil Menteri Pertanian dalam <i>side event ackling AMR: Curbing The AMR Pandemic</i>	<b>90</b>
<b>Gambar 66</b>	: Menghadiri AMM G20 di Bali	<b>91</b>
<b>Gambar 67</b>	: <i>Word Rabies Day</i> di Bali	<b>91</b>
<b>Gambar 68</b>	: Foto bersama para peserta anggota SEACFMD	<b>92</b>
<b>Gambar 69</b>	: Mempresentasikan kondisi PMK di Indonesia	<b>92</b>
<b>Gambar 70</b>	: Undangan BBVet Maros tentang sosialisasi Peta jalan Pembebasan PMK Nasional di Maros	<b>93</b>
<b>Gambar 71</b>	: Presentasi poster di <i>7<sup>th</sup> World One Health Congress</i>	<b>94</b>
<b>Gambar 72</b>	: Menyampaikan kondisi wabah PMK kepada Direktur Jenderal Badan Kesehatan Hewan Sedunia (WOAH) Dr. Manique Eloit	<b>94</b>
<b>Gambar 73</b>	: Mendampingi Dirjen PKH melakukan audiensi dengan Dubes Indonesia untuk Singapura Petahana Suryopratomo	<b>95</b>
<b>Gambar 74</b>	: Mendampingi Dirjen PKH melakukan bilateral meeting dengan Deputi Singapore <i>Food</i>	<b>95</b>

---

	<i>Agency dalam rangka percepatan ekspor unggas ke singapore</i>	
<b>Gambar 75</b>	: Menghadiri APHCA 43 <sup>rd</sup> <i>Bussiness Meeting &amp; Quarterly APHCA Executive Committe</i>	<b>97</b>
<b>Gambar 76</b>	: Pertemuan <i>Flamming Fund Fellowship</i>	<b>97</b>
<b>Gambar 77</b>	: Mengikuti kegiatan pengembangan diri secara virtual	<b>98</b>
<b>Gambar 78</b>	: Pembicaraan internasional dalam kegiatan <i>Launch of The AMR multi Stakeholder Partnership platform</i>	<b>98</b>

---

# BAB I

## RENCANA PROYEK PERUBAHAN

### A. LATAR BELAKANG

PMK atau *Apthae Epizootica* (AE), *Apthous Fever* (AF), *Foot and Mouth Disease* (FMD) adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap/belah (*cloven- hoofed*) seperti sapi, kambing, domba, rusa, unta, babi, dan termasuk hewan liar seperti gajah, antelope, bison, menjangan dan jerapah. Penyakit ini disebabkan oleh virus tipe A dari *family Picornaviridae*, *genus Aphthovirus yaitu Aphtae epizootecae*. Tanda dari munculnya penyakit ini adalah dilihat dari adanya pembentukan vesikel/lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku, dengan gejala umum adalah ternak terlihat lemah, lesu, kaki pincang, air liur berlebihan, tidak nafsu makan dan mulut melepuh, pada ternak potong terjadi penurunan bobot badan dan pada ternak perah terjadi penurunan produksi susu yang drastis.

Indonesia pernah mengalami beberapa kali wabah PMK sejak penyakit ini pertama kali masuk pada tahun 1887 melalui impor sapi perah dari Belanda. Wabah PMK terakhir terjadi di pulau Jawa pada tahun 1983 yang kemudian dapat diberantas melalui program vaksinasi massal setelah lebih dari 100 tahun. Selanjutnya Indonesia dinyatakan sebagai Negara bebas PMK pada tahun 1986, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.260/1986 dan kemudian diakui oleh OIE pada tahun 1990 dengan Resolusi no XI.

Status bebas PMK di Indonesia saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, pertengahan April 2022, Indonesia dikejutkan dengan adanya kasus PMK yang ditemukan di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh hingga menyebar ke Kabupaten lain dan selanjutnya sampai dengan saat ini telah menyebar ke 24 Provinsi dan 296 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia. Masuknya PMK

di Indonesia ternyata memiliki keterkaitan dengan beberapa negara di Asia Tenggara yang juga melaporkan adanya peningkatan kasus PMK.

PMK menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia, studi pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Potensi kerugian ekonomi akibat PMK di Indonesia dapat mencapai Rp. 9,9 Triliun per tahun akibat penurunan produksi, kematian ternak, harga jual murah, pelarangan/pembatasan ekspor ternak, produk ternak dan turunannya (olahan daging, susu, kulit, dan produk sampingan ternak), serta biaya vaksinasi (vaksin, operasional dan logistiknya). Beberapa data kerugian negara negara lain akibat penyakit PMK dapat tersaji pada gambar 2 berikut ini:

Negara	Cakupan	Spesies	Jumlah kerugian ekonomi	Referensi
India	Nasional, per tahun	Sapi, kerbau, domba, kambing dan babi	12.000-14.000 crore (US\$ 1,87-2,18 miliar) (Rp 21,9-29,2 triliun)	Singh et al., 2012
Pakistan	Desa, 6 bulan	Sapi, kerbau	Rs. 27.448.000 (US\$ 322.918) (Rp 4,3 miliar)	Gorsi, 2011
Ethopia	Nasional, per tahun	Sapi	1,354 miliar birr (US\$ 61 juta) (Rp 812,9 miliar)	Jemberu, 2016
Laos	Nasional, per tahun	Sapi dan kerbau	US\$ 13.512.291 (Rp 180 miliar)	Nampanya, 2014
Laos	Desa, per tahun	Sapi dan kerbau	US\$30.881 (Rp 4416 juta)	Nampanya, 2014
Australia	Nasional, 10 tahun	Semua ternak rentan	> A\$ 50 miliar (>US\$ 39,7 miliar) (>Rp 529,8 triliun)	Buetre et al., 2013

Gambar 2. Kerugian ekonomi akibat penyakit PMK

Pengendalian dan pemberantasan PMK membutuhkan waktu yang cukup lama. Penyakit ini sangat sulit ditangani karena merupakan penyakit pada ternak yang sangat infeksius dengan penularan yang cepat, penularan pada Multi spesies termasuk satwa liar, *Multiple serotipe* virus, pengendalian PMK bisa membutuhkan waktu lama dan intens sehingga motivasi peternak/*stakeholder* di daerah bisa menurun, Vaksin PMK memiliki Proteksi berumur pendek dengan terbatasnya strain dan tidak stabil (memerlukan rantai dingin) serta harga yang Mahal, Hewan yang sembuh bisa menjadi *carrier* atau *non-carrier*, sehingga kemungkinan memunculkan wabah yang berulang, Perputaran (*turnover*) dan pergerakan

populasi ternak yang cepat menyebabkan penyebaran sangat sulit diminimalisir dan Biaya serta dampak dari tindakan-tindakan pengendalian.

Melihat perkembangan penyebaran virus PMK, maka Sekretaris Kabinet menindak-lanjuti penanganan PMK tersebut dengan isi surat agar Menko Perekonomian mengkoordinasikan penanganan PMK lebih lanjut dengan menggunakan metode-metode pengendalian Covid-19 dengan memfungsikan kelembagaan yang sudah ada termasuk melakukan penyesuaian kelembagaan apabila diperlukan. Presiden Republik Indonesia dalam pernyataannya meminta pemerintah harus hadir dan mengambil langkah-langkah cepat dalam penanganan PMK di Indonesia.

Pelaksanaan langkah-langkah percepatan, Menteri agar berkoordinasi dengan pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pimpinan Pemda terkait khususnya Menteri. Selanjutnya Menko Perekonomian dalam rangka penanganan dan pengendalian PMK memasukkan dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mengusulkan Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK.

Namun hingga saat ini, penanganan PMK masih cenderung dilakukan secara *ad hoc* dan bersifat reaktif, belum ada rencana komprehensif penanganan PMK di Indonesia, meliputi pencegahan, penanganan hingga minimalisasi dampak khususnya terhadap produksi. Rencana penanganan PMK yang disusun sebaiknya mencakup strategi penanggulangan PMK yang diformulasikan berdasarkan kondisi sebaran PMK saat ini, penanganan PMK yang telah dilakukan, standar internasional dalam penanggulangan PMK, maupun *benchmarking* negara lain yang sedang menangani maupun telah terbebas dari PMK.

### Titah Jokowi: Tangani Wabah PMK Layaknya Pandemi Covid-19

NEWS - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia  
20 June 2022 18:55

SHARE |  



Gambar 3. Pernyataan Presiden RI Terkait Wabah PMK

Sesuai dengan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa Direktorat Kesehatan Hewan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyehatan hewan secara individu dan populasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Direktorat Kesehatan Hewan memiliki fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha

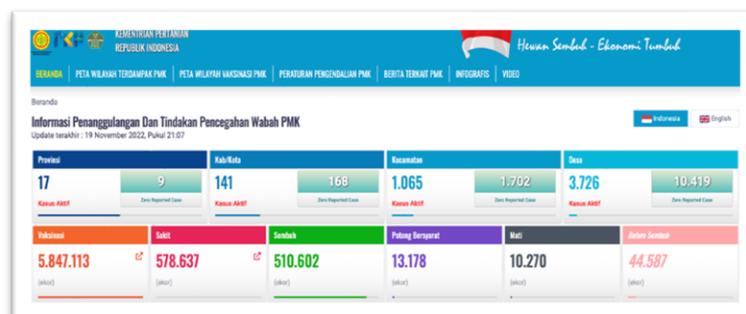
Berdasarkan uraian yang sudah diuraikan diatas dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Kesehatan hewan, dan pengendalian PMK melibatkan lintas sektor maka diperlukan peta jalan pemberantasan PMK nasional.

## B. Referensi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 403 dan 404 Tahun 2022 tentang Penetapan Daerah Wabah PMK pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Aceh, yang kemudian dimutakhirkan dengan penetapan wabah PMK pada 24 provinsi di Indonesia, maka PMK telah menyebar hampir diseluruh provinsi di Indonesia.

Instruksi presiden Jokowi menekankan bahwa penanganan PMK seperti penanganan Covid 19. Sesuai dengan usulan Menko Perekonomian dengan dasar Keputusan Menko Perekonomian (pelaksanaan Pepres No.37/2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pepres No.82/2020 Tentang KPCPEN jo Perpres No. 108 Tahun 2020, telah membentuk Satuan Tugas (satgas) Penanganan Wabah PMK pada hewan yang ditangani oleh Kepala BNPB. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak melalui Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022.

Berdasarkan data siaga PMK, sampai dengan pertengahan bulan September 2022, PMK telah menyerang 527.911 ekor, telah sembuh 394.519 ekor, sakit 113.156 ekor, mati 8.677 ekor dan potong bersyarat 11.559 ekor. Penyebaran PMK pada 24 provinsi (70%), 296 kabupaten (57%), 2.591 kecamatan (36%) dan 13.098 desa (16%). Data tersebut seperti gambar 4. (57%), 2.591 kecamatan (36%) dan 13.098 desa (16%). Data tersebut seperti gambar 4.



Gambar 4. Data PMK melalui [www.siagapmk.crisis-center.id](http://www.siagapmk.crisis-center.id)

Penyebaran PMK yang terjadi secara masif berdampak pada kesehatan hingga kematian hewan yang sebagian besar menyerang ternak

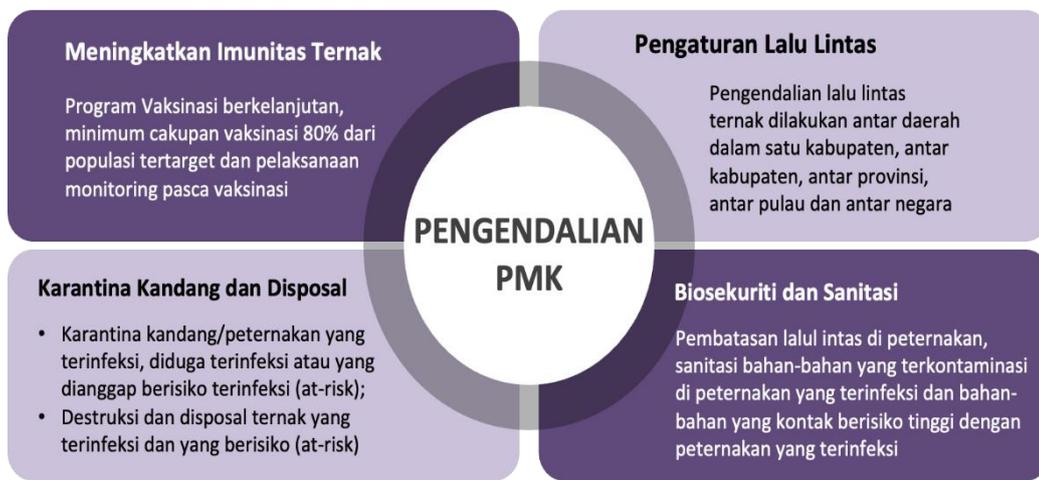
yang menjadi sumber konsumsi pangan hewani yang bersumber dari sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan rusa. Hal ini tentunya berdampak terhadap ketersediaan pangan asal hewani di Indonesia seperti daging dan susu. Pada akhirnya akan berdampak terhadap ketahanan pangan nasional dan Nilai Tukar Peternak (NTP).

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Prisma (2002) bahwa PMK berdampak terhadap kegiatan usaha ternak (71%), bisnis hotel dan restoran (52%), sektor pertanian (58%), perdagangan (47%), industri manufaktur (42%), transportasi (42%), jasa dan pelayanan (55%), bisnis finansial (23%) dan konstruksi (49%). Kerugian ekonomi bagi kegiatan usaha peternak terutama disebabkan oleh kehilangan produktivitas karena penurunan produksi susu (25% per tahun), penurunan tingkat pertumbuhan sapi potong (10-20%), kehilangan tenaga kerja (60-70%), penurunan fertilitas (10%) dan perlambatan kebuntingan, kematian anak (20-40%), dan pemusnahan ternak yang terinfeksi secara kronis.

Menurut analisis Naipospos (2012) bahwa perkiraan kerugian ekonomi akibat berjangkitnya PMK di Indonesia sekitar Rp. 9,6 triliun, sedangkan menurut Sofjan Sudardjat (2015), sekitar Rp. 15,5 triliun. Jika koefisien teknis analisisnya dikonversi pada data saat ini, kerugian ekonominya mungkin tidak kurang dari Rp. 20 triliun. Hal ini belum dihitung besarnya biaya pengendalian, dampak sektor primer, dampak sektor pengolahan, dampak yang terkait dengan turisme dan non pertanian, serta dampak hilangnya peluang perdagangan dan akan terjadi keterperangkapan pangan daging sapi nasional. Selain kerugian ekonomi yang terjadi tersebut, kerugian sosial pun cukup memprihatinkan. Kini di sentra wabah di Jawa Timur, telah beredar isu (via medsos) bahwa masyarakat jangan memakan daging dan susu sapi karena diduga akan tertular. Dampak selanjutnya dimungkinkan akan terjadi stunting yang meningkat.

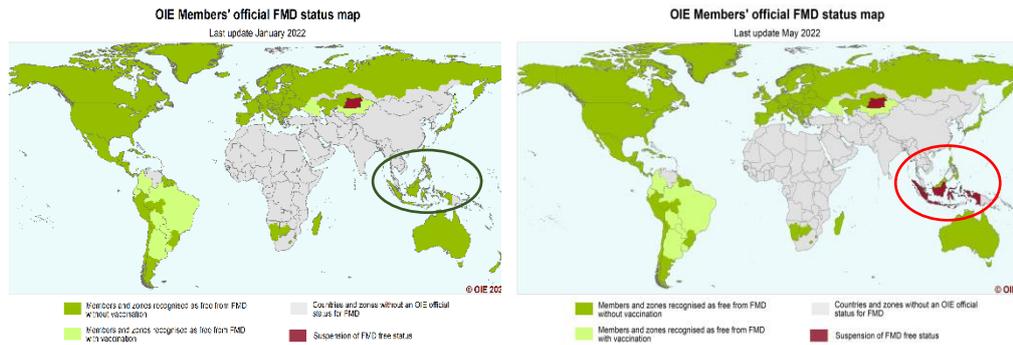
Berbagai upaya kedaruratan telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan satgas PMK untuk mengendalikan penyebaran PMK di Indonesia diantaranya melalui penerbitan regulasi berupa 5 (lima) SE satgas, 11 (sebelas) surat keputusan Menteri Pertanian,

4 (empat) Surat Edaran Menteri Pertanian, 6 (enam) keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tindakan kedaruratan lain yang dilakukan untuk mengendalikan PMK melalui pembentukan satuan tugas di provinsi/kabupaten/kota, pengobatan, pembatasan lalu lintas ternak, karantina/disposal, peningkatan biosekuriti, vaksinasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) bagi *stakeholder* terkait. Prinsip pengendalian PMK dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini.



Gambar 5. Prinsip pengendalian PMK

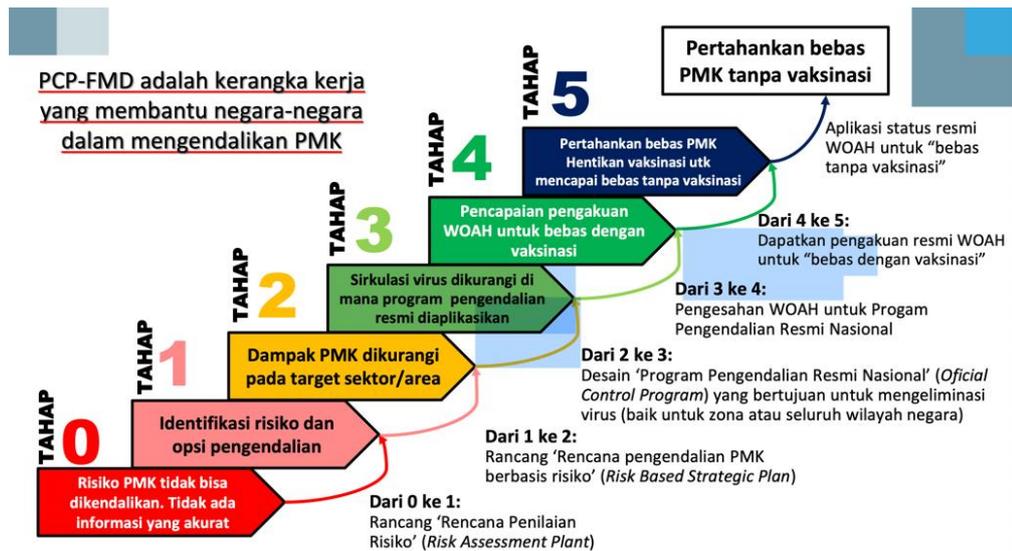
*World Organization Animal Health* (WOAH) atau badan Kesehatan hewan sedunia telah membagi 3 (tiga) status negara terhadap PMK yaitu: 1) Negara/zona bebas PMK di mana vaksinasi tidak dipraktikkan (artikel 8.8.2); 2) Negara/zona bebas PMK di mana vaksinasi dipraktikkan (artikel 8.8.3); dan 3) Negara/zona terinfeksi PMK. Saat ini status bebas PMK Indonesia telah ditangguhkan dari negara yang bebas menjadi negara yang tidak berstatus.



Gambar 6. Perubahan status PMK Indonesia berdasarkan WOAHO pada Januari dan Mei 2022

Indonesia dengan status PMK saat ini perlu membuat program pengendalian resmi berdasarkan standar WOAHO. Program pengendalian resmi tersebut bukan pengakuan status tetapi pengesahan terhadap rencana nasional dari suatu Negara Anggota yang beroperasi secara progresif menuju kebebasan dari PMK (dengan atau tanpa vaksinasi) sesuai dengan persyaratan OIE Code. Negara tidak perlu sudah bebas dari PMK tetapi harus memberikan bukti bahwa negara tersebut sudah memiliki suatu rencana nasional yang beroperasi menuju bebas.

PMK adalah penyakit lintas batas (*transboundary animal disease*) yang tidak mengenal batas-batas nasional maupun internasional. Untuk mengendalikan PMK secara efektif, perlu ada pendekatan regional. Proses peta jalan (*roadmap*) memungkinkan negara-negara di kawasan yang sama bersatu untuk berbagi kemajuan pengendalian PMK, dan untuk membandingkan kegiatan dan tahap *Progressive Control Pathway* (PCP) PMK dengan negara tetangga. PCP-PMK adalah kerangka kerja yang membantu negara negara dalam mengendalikan PMK yang dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. *Progressive Control Pathway (PCP) PMK dalam pengendalian PMK*

PCP-PMK yang dikembangkan oleh FAO dan EuFMD dan selanjutnya didukung oleh WOAHO, memandu negara-negara endemik melalui serangkaian langkah bertahap untuk mengelola risiko PMK dengan lebih baik. PCP-PMK mengakui bahwa perbedaan risiko infeksi yang terjadi antara (dan di dalam) negara-negara tertular, dan negara-negara tersebut berada pada tahap berbeda dalam mengelola risiko infeksi. PCP-PMK menerapkan pendekatan pengurangan risiko (*risk-reduction*) di mana setiap negara didorong untuk mengembangkan strategi pengurangan risiko nasional yang mendukung upaya regional. PCP-PMK adalah komponen inti dari "Strategi Pengendalian PMK Global" (*Global FMD Control Strategy*).

Sampai saat ini Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian PMK. Beberapa regulasi telah diterbitkan dan kegiatan kegiatan penanganan telah dilakukan namun langkah langkah yang telah dilakukan tersebut masih bersifat *ad hoc*. Namun mencermati laporan kasus PMK masih dilaporkan terus bertambah, dampak PMK yang terus dirasakan oleh peternak dan masyarakat, adanya kendala ekspor ternak ke berbagai negara antara lain pelarangan ekspor kambing ke Malaysia, pembatasan lalu lintas ternak yang menyebabkan distribusi pangan hewani terganggu, hambatan lainnya dalam penyediaan vaksin dan obat obatan, sumber daya

manusia Kesehatan hewan yang terbatas, dan penanganan PMK lintas sektor yang belum terkoordinasi dengan baik.

Saat ini yang telah disusun adalah kesiapsiagaan veteriner Indonesia terhadap PMK (KIATVETINDO PMK) yang telah disusun sebelum PMK mewabah di Indonesia, namun berdasarkan beberapa uraian di atas, maka perlu perencanaan dalam penanganan penyakit PMK secara nasional di Indonesia sehingga proyek perubahan (Proper) ini dirancang untuk mendesain strategi penanggulangan PMK tersebut kemudian dijabarkan menjadi program, kegiatan hingga sub kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan jangka pendek (*destination statement*) tahunan menuju Indonesia bebas PMK. Selain itu, perlu juga disusun indikator keberhasilan penanggulangan PMK nasional yang nanti akan diturunkan menjadi indikator keberhasilan penanggulangan PMK untuk setiap Kementerian/Lembaga/Pemda terkait. Untuk itu, maka perlu disusun Peta Jalan Strategis (*strategic roadmap*) Penanggulangan PMK di Indonesia.

## C. TUJUAN DAN MANFAAT

### C.1. Tujuan

Tujuan utama pembangunan proyek perubahan adalah peta jalan pemberantasan PMK nasional.

Adapun tujuan proyek perubahan secara bertahap berikut:

#### 1. Tujuan jangka pendek (*Short Term Goal*)

Tujuan jangka pendek akan dicapai dalam waktu 2 (dua) bulan.

Adapun tujuan jangka pendek sebagai berikut:

- a. Menganalisis sebaran dan dampak PMK bagi Indonesia;
- b. Menganalisis penanggulangan PMK yang telah dilakukan saat ini;
- c. Melakukan *benchmarking* negara negara lain terhadap *best practices* penanggulangan PMK;
- d. Merancang peta jalan pemberantasan PMK nasional beserta strateginya;
- e. Menetapkan peta jalan pemberantasan PMK nasional beserta strateginya dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Pertanian;

- f. Mensosialisasikan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang peta jalan pemberantasan PMK nasional.

## 2. Tujuan jangka menengah (*Medium Term Goal*)

Tujuan jangka menengah akan dicapai dalam waktu 6-12 bulan. Adapun tujuan jangka menengah yaitu mengimplementasikan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang peta jalan pemberantasan PMK Nasional.

## 3. Tujuan jangka Panjang (*Long Term Goal*)

Tujuan jangka panjang akan dicapai dalam waktu 12-24 bulan. Adapun tujuan jangka panjang mengevaluasi implementasi Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang peta jalan pemberantasan PMK nasional.

### **C.2. Manfaat**

Proper ini memberikan sumbangan pemikiran dan arahan bagi seluruh *stakeholder* untuk pengendalian dan pemberantasan PMK di Indonesia. Adapun manfaat praktis dari proper ini, sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Pribadi

- a. Melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan yang diemban saat ini sebagai Direktur Kesehatan Hewan;
- b. Berkontribusi dan berpartisipasi aktif untuk pengendalian dan pemberantasan PMK sebagai bagian dari tanggung jawab teknis sebagai pejabat otoritas veteriner nasional;
- c. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai tanggung jawab keprofesian terhadap penanggulangan PMK di Indonesia.
- d. Pada akhirnya mampu membuat dan mengimplementasikan kebijakan nasional terhadap pengendalian penyakit hewan lainnya di Indonesia.

#### 2. Manfaat Instansi

Manfaat proper bagi instansi sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar dan pedoman dalam pengendalian dan pemberantasan PMK di Indonesia;
- b. Sebagai peta jalan dan acuan dalam penanggulangan PMK secara komprehensif oleh seluruh K/L/Pemda serta institusi lain yang terkait;
- c. Sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan penanggulangan PMK dari waktu ke waktu, baik tingkat nasional maupun K/L/Pemda;
- d. Peningkatan efektivitas perencanaan dan kinerja penanggulangan PMK di Indonesia;
- e. Sebagai pedoman yang efektif dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan;
- f. Meningkatkan reputasi Ditjen PKH Kementerian Pertanian sebagai *focal point* WOAHA di Indonesia;
- g. Sebagai umpan balik (*feedback*) bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan strategis terkait pengendalian dan penanganan PMK; dan
- h. Sebagai dasar bagi pimpinan untuk mengambil keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut program pengendalian PMK.

### 3. Manfaat *Stakeholder* (K/L terkait)

Manfaat proper bagi *stakeholder* dapat dikemukakan, sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan K/L terkait dalam perencanaan dan implementasi penanggulangan PMK;
- b. Sebagai acuan dalam penanggulangan PMK secara komprehensif oleh seluruh K/L/Pemda serta institusi lain;
- c. Sebagai acuan indikator keberhasilan bagi K/L terkait dalam penanggulan PMK di wilayahnya masing masing.

#### 4. Manfaat bagi masyarakat

- a. Kejadian PMK dapat tertangani dengan baik sehingga peternak dapat kembali beternak dengan tenang;
- b. Produktivitas hasil peternakan (sapi dan susu) dapat Kembali diproduksi oleh para peternak;
- c. Kepercayaan masyarakat meningkat pada pemerintah khususnya Kementerian Pertanian sehingga dapat mengambil peran partisipatif untuk kepentingan bersama.

### D. KELUARAN (*OUTPUT*) DAN HASIL (*OUTCOME*)

#### D.1. Keluaran (*Output*)

Keluaran (*output*) pembangunan proper dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahapan jangka pendek, tahapan jangka menengah dan tahapan jangka Panjang. Adapun rincian masing-masing keluaran (*output*), disampaikan sebagai berikut:

##### 1. Keluaran Jangka Pendek (*Short Term Output*)

- a. Tersedianya hasil analisis sebaran dan dampak PMK bagi Indonesia;
- b. Tersedianya hasil analisis penanggulangan PMK yang telah dilakukan saat ini;
- c. Tersedianya hasil *benchmarking* negara negara lain terhadap *best practices* penanggulangan PMK;
- d. Tersedianya Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang peta jalan pemberantasan PMK nasional beserta strateginya ;
- e. Tersosialisasikanya Keputusan Menteri Pertanian tentang peta jalan pemberantasan PMK nasional beserta strateginya.

##### 2. Jangka Menengah (*Medium Term Output*)

Terimplementasikannya Keputusan Menteri Pertanian tentang peta jalan pemberantasan PMK Nasional beserta strateginya.

3. Keluaran Jangka Panjang (*Long Term Output*)

Terevaluasinya implementasi dari Keputusan Menteri Pertanian tentang peta jalan pemberantasan PMK nasional beserta strateginya.

**D.2. Hasil (*Outcome*)**

Hasil (*Outcome*) yang diharapkan dari proper ini adalah terimplementasinya dan terevaluasinya pelaksanaan keputusan menteri pertanian tentang peta jalan pemberantasan PMK nasional beserta strateginya.

**E. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**

**E.1. Analisis Lingkungan Strategis**

Untuk mengetahui lingkungan strategis Direktorat Jendral PKH dilakukan dengan analisis *Strengths, Opportunities, Aspirations, dan Results (SOAR)*. *SOAR Analysis* merupakan pengembangan alternatif dari *SWOT Analysis* yang telah dikenal sebelumnya. *SOAR Analysis* dicetuskan atau dikembangkan oleh Stravros, *Cooperride* dan *Kelly* (2003) dengan pendekatan *Appreciative Inquiry (AI)* untuk menghindari perasaan negatif dari anggota organisasi dalam memandang Kelemahan (*Weakness*) dan Ancaman (*Threats*) sebagai faktor yang dapat menurunkan motivasi untuk berbuat yang terbaik. Analisis lingkungan strategis Ditjen PKH disampaikan sebagaimana pada gambar 8, berikut:



Gambar 8. Analisis Lingkungan Strategis SOAR

## E.2. Rumusan strategi

Berdasarkan peta analisis SOAR di atas dan dengan mempertimbangkan aspek *Strength* yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka strategi yang pilih dalam rancangan Proper adalah *Opportunities* dan *Result (OR)*, yaitu: strategi *grand design* pengendalian dan pemberantasan PMK di Indonesia. Strategi tersebut diarahkan sebagai 1) peta jalan dan dapat dijadikan acuan dalam penanggulangan PMK secara komprehensif oleh seluruh K/L/Pemda serta institusi lain yang terkait; 2) acuan dalam mengukur keberhasilan penanggulangan PMK dari waktu ke waktu, baik tingkat nasional maupun K/L/Pemda.

## E.3. Sasaran Jangka pendek, Menengah, dan Panjang

Sasaran (*Milestones*) jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam proper sebagaimana disajikan pada tabel 1, berikut:

Tabel 1. Sasaran Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang

No	Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Waktu	Penanggung jawab
<b>I. Jangka Pendek (2 bulan)</b>				
1.	Membangun Tim Efektif	Tim Efektif Jadwal kerja	Sept 2022 (M4)	<i>Project Leader</i>
2.	<i>Kick of meeting</i>	Komitmen multisektor	Sept 2022 (M4)	<i>Project Leader</i>
3.	Analisis sebaran dan dampak PMK			
a.	Mengumpulkan data dan analisis data sekunder	Dokumen analysis	Okt 2022 (M1)	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif
b.	FGD 1: Dampak PMK dari perspektif Pakar/ expert	Hasil FGD 1 Rekomendasi Pakar/Expert	Okt 2022 (M1)	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif

c.	FGD 2: Dampak PMK bagi Peternak	Hasil FGD 2 (Rekomendasi Peternak)	Okt 2022 (M1)	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif
<b>4.</b>	Analisis Penanggulangan PMK yang dilakukan saat ini			
a.	Pemetaan Kebijakan yang diterbitkan terkait PMK	Hasil pemetaan kebijakan	Okt 2022 (M2)	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif
b.	Analisis laporan penanggulangan PMK yang sudah dilaksanakan	Hasil analisis Laporan	Okt 2022 (M2)	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif
c.	FGD 3: Evaluasi Penanggulangan PMK yang telah dilakukan	Hasil FGD 3 Rekomendasi evaluasi	Okt 2022 (M2)	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif
<b>5.</b>	Analisis <i>bench marking</i> terhadap <i>best practice</i> penanggulangan PMK di Negara lain			
a.	Analisis penanggulangan PMK pada negara yang proses menuju bebas PMK (Brazil)	Hasil konsultasi dengan Brazil ( <i>offline</i> )	Okt 2022 (M2)	<i>Project Leader</i> , Tim efektif dan pakar
b.	Analisis negara kepulauan yang bebas PMK (NewZealand)	Hasil konsultasi dengan New Zealand ( <i>Offline</i> )	Okt 2022 (M2)	<i>Project Leader</i> , Tim efektif dan pakar
c.	Analisis penanggulangan PMK di negara <i>South East Asia and China</i>	Hasil konsultasi dengan SEAC FMD ( <i>offline</i> )	Okt 2022 (M2)	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif
<b>6.</b>	<i>Expert judgement</i> penanggulangan PMK di Indonesia			
a.	FGD 4: Pakar teknis PMK	Hasil FGD Pakar teknis	Okt 2022 (M3)	<i>Project Leader</i> , Tim

				efektif dan pakar
<b>b.</b>	FGD 5: Pembuat/ pelaksana Kebijakan PMK	Hasil FGD Regulator	Okt 2022 (M3)	<i>Project Leader</i> , Tim efektif dan pakar
<b>c.</b>	Depth Interview Peternak terdampak	Hasil FGD Peternak	Okt 2022 (M3)	<i>Project Leader</i> , Tim efektif dan pakar
<b>d.</b>	Formulasi hasil <i>expert judgement</i>	Hasil <i>Discourse analysis</i>	Okt 2022 (M3)	<i>Project Leader</i> , Tim efektif dan pakar
<b>7.</b>	Identifikasi Standar International Penanggulangan PMK berdasarkan WOAH/OIE			
<b>a.</b>	Identifikasi dan analisis standar internasional PMK	Hasil <i>Desk Research</i>	Okt 2022 (M4)	<i>Project Leader</i> , Tim efektif dan pakar
<b>b.</b>	FGD 7: Validasi standar WOAH/OIE penanggulangan PMK yang akan digunakan di Indonesia	Hasil FGD standar WOAH/ OIE	Okt 2022 (M4)	<i>Project Leader</i> , Tim efektif dan pakar
<b>8.</b>	Strategi <i>grand design</i> Penanggulangan PMK			
<b>a.</b>	Formulasi strategi penanggulangan PKM	Development strategi	Nov 2022 (M1)	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif
<b>b.</b>	FGD 8: Validasi strategi penanggulangan PMK	Dokumen strategi penanggulang an PMK	Nov 2022 (M1)	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif
<b>9.</b>	Penyusunan Program, kegiatan, sub Kegiatan, dan indikator Keberhasilan penanggulangan PMK			

a.	FGD 9: menentukan Program, kegiatan, sub Kegiatan serta indicator keberhasilan pemberantasan PMK	Dokumen Program, kegiatan, sub Kegiatan	Nov 2022 (M2)	<i>Project Leader dan Tim efektif</i>
10.	Pembuatan dan pembahasan naskah Kepmentan Pemberantasan PMK	Dokumen Draft	Nov 2022 (M2)	<i>Project Leader dan Tim efektif</i>
11.	Penetapan menteri peta jalan Pemberantasan PMK	SK Menteri	Desember 2022 (M 2)	<i>Project Leader dan Tim Efektif</i>
12.	Sosialisasi menteri peta jalan Pemberantasan PMK	Laporan Sosialisasi	November 2022 (W3)	<i>Project Leader dan Tim Efektif</i>
13.	Laporan Proper	Laporan	Nov 2022 (M2)	<i>Project Leader dan Tim efektif</i>
<b>Jangka Menengah (&lt; 1 tahun)</b>				
14.	Implementasi keputusan menteri tentang Peta jalan Pemberantasan PMK	SK Menteri	Desember 2022 (M 2)	<i>Project Leader dan Tim Efektif</i>
<b>Jangka Panjang (&gt;1 tahun)</b>				
15.	Monev peta jalan Pemberantasan PMK	Laporan Monev	Tahun 2023	<i>Project Leader dan Tim Efektif</i>
16.	Updating peta jalan pemberantasan PMK (jika ada)	Laporan <i>updating</i>	Tahun 2023	<i>Project Leader dan Tim Efektif</i>

## F. RENCANA STRATEGIS MARKETING

### F.1 Identifikasi *Stakeholder*

*Stakeholders* dalam proyek perubahan ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proyek perubahan, baik yang berasal dari internal dan eksternal organisasi sebagaimana disajikan pada tabel 2, berikut:

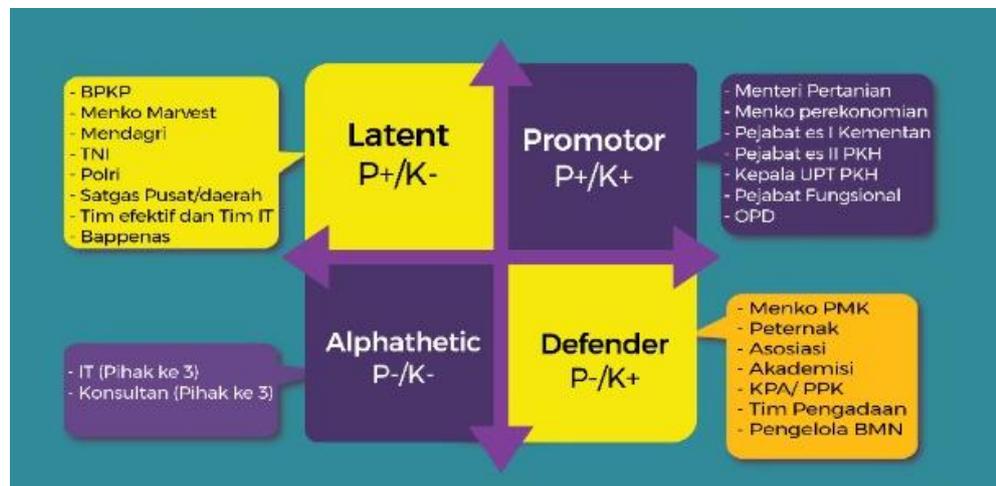
Tabel 2. Hasil Identifikasi *Stakeholder Internal* dan *Stakeholder Eksternal*

<i>Stakeholder</i>		Deskripsi
<b><i>Stakeholder Internal:</i></b>		
1. Menteri Pertanian	:	Promotor
2. Direktur Jendral	:	Mentor
3. Pejabat Eselon I	:	Promotor
4. Pejabat Eselon II lingkup Kementan	:	Promotor
5. Pejabat Fungsional lingkup Kementan	:	Latent
6. Pimpinan UPT lingkup PKH	:	Promotor
7. Tim efektif	:	Latent
8. Tim IT	:	Alphathetic
9. Kuasa Pengguna Anggaran	:	Defender
10. Pejabat Pembuat Komitmen	:	Defender
11. Pejabat Pengelola Keuangan	:	Defender
12. Pejabat Pengelola BMN	:	Defender
13. Pejabat Pengadaan	:	Defender
<b><i>Stakeholder Eksternal:</i></b>		
1. BPKP	:	Latent
2. Menko Perekonomian	:	Promotor
3. OPD	:	Promotor
4. Bappenas	:	Latent
5. Menko Marves	:	Latent
6. Mendagri	:	Latent
7. TNI	:	Latent
8. Polri	:	Latent
9. Satgas PMK Pusat/ daerah	:	Latent

10. Menko PMK	:	Defender
11. Peternak	:	Defender
12. Asosiasi	:	Defender
13. Pihak ketiga IT	:	Alphathetic
14. Akademisi	:	Defender
15. Pihak ketiga Konsultan	:	Alphathetic

## F.2 Analisis Peta Stakeholder

Hasil analisis peta *stakeholder* sebagaimana disajikan pada gambar 9 berikut:



Gambar 9. Hasil Analisis Peta Stakeholder

## F.3 Strategi Marketing Sector Public

### 1. Customer

- Seluruh pimpinan dan pegawai unit kerja lingkup PKH dan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian
- Stakeholder Internal* dan *Eksternal* Kementerian Pertanian

### 2. Product

- Kebijakan/Regulasi tentang *Grand design* sebagai peta jalan pengendalian dan pemberantasan PMK di Indonesia
- Sistem Aplikasi siaga PMK (isikhnas), IVlab dan logistik

### 3. Price

- Biaya rancang bangun, promosi dan pemeliharaan bersumber dari APBN Kementerian Pertanian;

- b. Dukungan kegiatan dari mitra pembangunan seperti FAO dan AIHSP
- c. Sebagai bentuk layanan publik sehingga bebas biaya bagi pengguna/*stakeholder*.

**4. Place**

- a. Kantor Pusat Kementerian Pertanian,
- b. Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan
- c. Satuan Kerja Daerah (Satker OPD) yang mengelola APBN penanggulangan PMK Kementerian Pertanian.

**5. Promotion**

- a. Nama (*Branding*) “Pelabas PMK”
- b. Sosialisasi dan pengenalan melalui *website* dan media sosial



Instagram  
 Dapat diakses melalui link :  
<https://www.instagram.com/p/CIPzULGyZMs/?igshid=N2ZiY2E3YmU=>



Facebook  
 Dapat diakses melalui link :  
[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid02TsvAkmszPXig63mWByRn4QjmhDfth3jTcPAqfa2rbWnah8Dt5wCS9U6Q1cm1APSul&iid=100063741188813&mibextid=Nif5oz](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TsvAkmszPXig63mWByRn4QjmhDfth3jTcPAqfa2rbWnah8Dt5wCS9U6Q1cm1APSul&iid=100063741188813&mibextid=Nif5oz)

Gambar 10. Strategi *Marketing*

## G. POTENSI KENDALA DAN RENCANA SOLUSI

### G.1. Potensi Risiko dan Rencana Mitigasi Risiko Proyek Perubahan

Potensi Risiko dan rencana mitigasi risiko saat proses bisnis proyek perubahan Peta Jalan pemberantasan PMK Nasional sebagaimana disajikan pada Tabel 3, berikut:

Tabel 3. Potensi Risiko dan Mitigasi Risiko Rencana Proses Proyek Perubahan

Proses Bisnis	Risiko	Mitigasi Risiko
1. <b>Komunikasi</b> dengan Mentor/Atasan Langsung, <i>Coach</i> dan <i>Stakeholder</i>	Sulit ketemu dengan mentor dan <i>coach</i> karena banyak kesibukan;	1. Menyusun agenda pertemuan; 2. Membuat time table pertemuan yang disepakati; 3. Menyusun jadwal ulang pertemuan dengan mentor dan <i>coach</i>
4. <b>Gagasan Terpilih</b> ( <i>Feasible &amp; Implementable</i> )	1. Ide gagasan ditolak oleh Mentor dan <i>coach</i> ; 2. Ide gagasan banyak revisi perbaikan;	1. Segera menyusun ide gagasan baru; 2. Mencatat koreksi dari mentor dan <i>coach</i> pada Kartu Kendali 3. Segera melakukan perbaikan sesuai dengan koreksi 4. Melakukan konsultasi terhadap perbaikan yang telah dilakukan kepada mentor dan <i>coach</i>
5. <b>Penulisan Rancangan</b>	1. Penulisan rancangan	1. Mencari <i>literature/referensi</i>

Proses Bisnis	Risiko	Mitigasi Risiko
<b>Proyek Perubahan</b>	<p>Proper tidak lancar</p> <p>2. Rancangan Proper di tolak oleh pimpinan (mentor)</p>	<p>2. Diskusi dengan <i>team agile</i> dan <i>bench marking</i></p> <p>3. Konsultasi dengan <i>Coach</i> atau mentor</p>
6. <b>Seminar Rancangan Proyek Perubahan (RPP)</b>	Waktu seminar sudah dekat namun bahan seminar belum siap;	Bekerjasama dengan tim untuk menyiapkan bahan seminar;
7. <b>Pelaksanaan Proyek Perubahan</b>	Koordinasi dengan tim efektif terkendala karena padat kegiatan	Melakukan komunikasi intensif dengan Tim Efektif
8. <b>Komunikasi Lanjutan</b> dengan Atasan/Mentor, <i>Stakeholder</i> , <i>Coach</i>	<p>1. Sulit ketemu dengan mentor dan <i>coach</i> karena banyak kesibukan;</p> <p>2. <i>Stakeholder</i> eksternal kesulitan komunikasi karena ketiadaan jaringan;</p>	<p>1. Membuat <i>time table</i> pertemuan baru yang disepakati;</p> <p>2. Menyusun jadwal ulang pertemuan dengan mentor dan <i>coach</i>;</p> <p>3. Melakukan komunikasi intensif dengan <i>stakeholder</i> dengan jalur jaringan alternative lainnya</p>
4. <b>Seminar Proyek Perubahan Instansi</b>	1. Waktu seminar sudah dekat namun bahan seminar belum siap;	1. Bekerjasama dengan tim untuk menyiapkan bahan seminar;

Proses Bisnis	Risiko	Mitigasi Risiko
	2. Pelaksanaan seminar tertunda; 3. Mentor dan <i>coach</i> tidak bisa hadir.	2. Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyusun agenda baru seminar. 3. Mencari narasumber lain seijin mentor dan <i>coach</i> sebagai;

## G.2 Potensi Risiko dan Mitigasi Risiko Implementasi Proper

Berikut disampaikan potensi risiko dan mitigasi risiko Implementasi Proper, sebagaimana disajikan pada tabel 4, berikut:

Tabel 4. Potensi Risiko dan Mitigasi Risiko Proyek Perubahan

Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
1. Aplikasi belum optimal dimanfaatkan	1. Review dilakukan kepada seluruh penanggung jawab yang pada unit kerja. 2. Melakukan kajian dan evaluasi ( <i>review</i> ) efektivitas penerapan peta jalan pemberantasan PMK nasional 3. Pimpinan memantau pengelolaan dan penerapan peta jalan secara periodik
2. SDM belum siap	1. Melakukan sosialisasi dan bimtek terkait sistem yg digunakan
3. Pelaporan tidak berjalan	Difasilitasi melalui sistem

Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
4. Implementasi peta jalan pemberantasan PMK nasional tidak optimal	Pemberian <i>reward /punishment</i>

### G.3 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor kunci keberhasilan dari proyek perubahan peta jalan pemberantasan PMK nasional adalah

1. Komitmen pimpinan untuk menempatkan “Pelabas PMK” menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan PMK;
2. Dukungan sarana prasarana dan anggaran;
3. Dukungan mitra pembangunan dalam penyusunan dan implementasi “Pelabas PMK”;
4. Dukungan *stakeholder internal* maupun *ekternal* dalam memanfaatkan “Pelabas PMK”;
5. Dukungan SDM dan keberlanjutan sistem berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

### H. Tim Efektif

Tata kelola proyek perubahan “Pelabas PMK” sebagai berikut:

1. *Mentor/Project Sponsor*  
Direktur Jenderal PKH Kementerian Pertanian, Dr. Ir Nasrullah, M.Sc
2. *Coach*  
Dr. Wahyu Suprapti, MM, M. Psi-T
3. *Project Suport*  
Sekretaris Ditjen PKH, Drh. Makmun, M.Si
4. *Project Leader*  
Nuryani Zainuddin
5. Tim Efektif terdiri dari Tim IT, Tim Subtansi dan Tim pakar.

## I. ANGGARAN

Pelaksanaan proyek perubahan dalam tahapan jangka pendek awalnya belum dianggarkan secara khusus. Mengingat pentingnya peta jalan pemberantasan PMK Tahun 2023-2035 nasional dan adanya anggaran yang penanggulangan PMK maka kegiatan penyusunan Roadmap ini dianggarkan dari kegiatan pengendalian PMK. Adapun Anggaran untuk penyusunan peta jalan ini sebagai berikut:

Tabel 5. Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Proyek Perubahan Tahun

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN (Rp)	TOTAL
1	Biaya Pertemuan	5	50.000.000	250.000.000
2	Biaya Honor	100	1.000.000	100.000.000
3	Desain	1	50.000.000	50.000.000
4	Percetakan	100	75.000	7.500.000
<b>Total</b>				<b>407.500.000</b>

## BAB II

### PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

#### II.A. Capaian Hasil Rencana Perubahan dan Manfaat Proyek Perubahan

Pelaksanaan proyek perubahan peta jalan pemberantasan PMK Nasional 2023-2035 digambarkan dalam kerangka dibawah ini:



Gambar 11. Strategi Pembebasan PMK

Tabel 6. Kegiatan implementasi proyek perubahan peta jalan pembebasan PMK Nasional

No	Kegiatan	Keluaran (Output)	Waktu	PJ/ URL	QR
1.	Membangun Tim Efektif	Tim Efektif Jadwal kerja	1 Sept 2022	<i>Project Leader</i> <a href="https://bit.ly/SuratKeputusanMentan">https://bit.ly/SuratKeputusanMentan</a>	

2.	<i>Kick of meetingi Taking ownership</i>	Komitmen multisektor	9 Sept 2022	<i>Project Leader</i> <a href="https://bit.ly/Evidance2">https://bit.ly/Evidance2</a>	
3.	Analisis sebaran dan dampak PMK				
a.	Mengumpulkan data dan analisis data sekunder	Dokumen <i>analysis</i>	23 Sept 2022	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif <a href="https://bit.ly/Evidance3a">https://bit.ly/Evidance3a</a>	
c.	FGD: Dampak PMK bagi Peternak (asosiasi terkait)	Hasil FGD (Rekomendasi Peternak)	3 Nov 2022	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif <a href="https://bit.ly/Evidance3c">https://bit.ly/Evidance3c</a>	
4.	Analisis Penanggulangan PMK yang dilakukan saat ini				
a.	Pemetaan Kebijakan, peraturan terkait PMK	Hasil pemetaan kebijakan	26- 27 Sept 2022	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif <a href="https://bit.ly/Evidance4a">https://bit.ly/Evidance4a</a>	
b.	FGD Analisis Evaluasi Penanggulangan PMK yang telah dilakukan	Hasil FGD Rekomendasi evaluasi	30 Sept - 1 Okt 2022	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif <a href="https://bit.ly/Evidance4b">https://bit.ly/Evidance4b</a>	
5.	Analisis <i>bench marking</i> terhadap <i>best practice</i> penanggulangan PMK di Negara lain				
a.	Analisis penanggulangan PMK pada negara yang proses menuju	Hasil konsultasi dengan Brazil ( <i>offline</i> )	12 Sept 2022	<i>Project Leader,</i> Tim efektif dan pakar <a href="https://bit.ly/Evidance5a">https://bit.ly/Evidance5a</a>	

	bebas PMK (Brazil)				
b.	Analisis negara kepulauan yang bebas PMK (New Zealand)	Hasil konsultasi dengan New Zealand (Offline)	31 Okt 2022	Project Leader, Tim efektif dan pakar <a href="https://bit.ly/Evidance5b">https://bit.ly/Evidance5b</a>	
c.	Analisis penanggulangan PMK di negara South East Asia and China	Hasil konsultasi dengan SEAC FMD (offline)	3-5 Okt 2022	Project Leader dan Tim efektif <a href="https://bit.ly/Evidance5c">https://bit.ly/Evidance5c</a>	
6.	<i>Expert judgement</i> penanggulangan PMK di Indonesia				
a.	FGD Pembuat/pelaksana Kebijakan PMK	Hasil FGD Regulator	10-12 Okt 2022	Project Leader, Tim efektif dan pakar <a href="https://bit.ly/Evidance6a">https://bit.ly/Evidance6a</a>	
b	<i>Depth Interview</i> Peternak terdampak	Hasil FGD Peternak	4-5 Nov 2022	Project Leader, Tim efektif dan pakar <a href="https://bit.ly/Evidance6b">https://bit.ly/Evidance6b</a>	
c	<i>Depth Interview</i> Asosiasi terkait	Hasil <i>Discourse analysis</i>	3 Nov 2022	Project Leader, Tim efektif dan pakar <a href="https://bit.ly/Evidance6c">https://bit.ly/Evidance6c</a>	
7.	Identifikasi Standar International Penanggulangan PMK berdasarkan WOAHOIE				

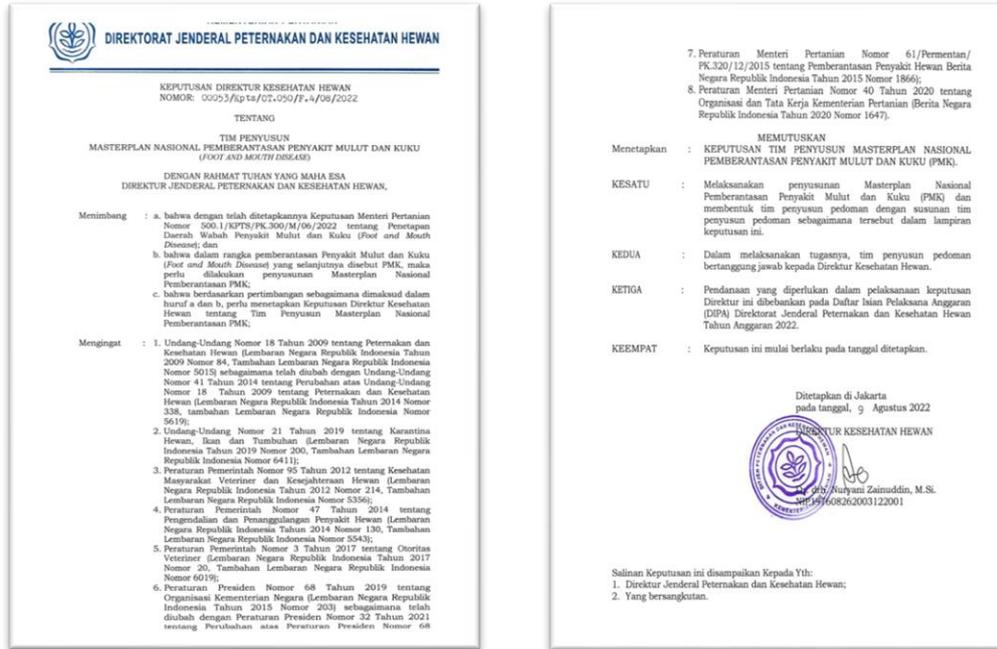
a.	Identifikasi dan analisis standar internasional PMK	Hasil <i>Desk Research</i>	24-26 Okt 2022	<i>Project Leader</i> , Tim efektif dan pakar <a href="https://bit.ly/Evidance7a">https://bit.ly/Evidance7a</a>	
b.	FGD Validasi standar WOAHO/OIE penanggulangan PMK yang akan digunakan di Indonesia	Hasil FGD standar WOAHO/OIE	10 Nov 2022	<i>Project Leader</i> , Tim efektif dan pakar <a href="https://bit.ly/Evidance7b">https://bit.ly/Evidance7b</a>	
8.	Validasi strategi penanggulangan PMK	Dokumen strategi penanggulangan PMK	2 Nov 2022	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif <a href="https://bit.ly/Evidance8">https://bit.ly/Evidance8</a>	
9.	FGD menentukan Program, kegiatan, sub Kegiatan serta indikator keberhasilan pemberantasan PMK	Dokumen Program, kegiatan, sub Kegiatan	10-12 Nov 2022	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif <a href="https://bit.ly/Evidance9">https://bit.ly/Evidance9</a>	
10.	FGD Peta jalan pemberantasan PMK nasional dgn K/L	Draft Peta Jalan	17 Nov 2022	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif <a href="https://bit.ly/Evidance10">https://bit.ly/Evidance10</a>	

11.	Pembuatan dan pembahasan naskah Kepmentan peta jalan Pemberantasan PMK	Dokumen Draft	15 Nov 2022	<i>Project Leader</i> dan Tim efektif <a href="https://bit.ly/Evidance11">https://bit.ly/Evidance11</a>	
12.	Sosialisasi menteri peta jalan Pemberantasan PMK	Laporan Sosialisasi	21 Nov 2022	<a href="https://bit.ly/SosialisasipetajalanPMK">https://bit.ly/SosialisasipetajalanPMK</a>	
13.	Penetapan menteri peta jalan Pemberantasan PMK	SK Menteri	22 Nov 2022	<a href="https://bit.ly/SKmentan">https://bit.ly/SKmentan</a>	

Kegiatan implementasi dari proyek perubahan ini dilaksanakan dengan rincian dari masing masing milestone jangka pendek yang dirangkum pada kegiatan di bawah ini:

### 1. Membangun Tim Efektif

Guna melaksanakan penyusunan Peta Jalan (*roadmap*) Pemberantasan PMK ini, maka dibentuk suatu Tim Efektif pengendalian dan penanggulangan PMK. Direktorat Kesehatan Hewan Membentuk Tim Efektif dengan mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 1 September 2022 (Gambar 12), yang bertugas melakukan penyusunan Peta Jalan (*roadmap*) Pemberantasan PMK. *Output* dari kegiatan ini adalah Surat Keputusan Direktorat Kesehatan Hewan (No. 00053/KPTS/OT.050/F4/08/ 2022 tentang Tim penyusunan *masterplan* Nasional pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku.



Gambar 12. Surat Keputusan Direktorat Kesehatan Hewan (No. 00053/KPTS/OT.050/F4/08/ 2022

## 2. Kick-off meeting

Setelah tim efektif penyusunan Peta Jalan (*roadmap*) Pemberantasan PMK ini terbentuk, maka dilakukan *kick off meeting* dalam menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama dalam penyusunan peta jalan. *Kick off meeting* dilakukan bersama tim efektif untuk menyepakati aktivitas dan *timeline* yang akan dilakukan beserta *milestone*. *Kick off meeting* juga memperkirakan hambatan yang



Gambar 13. *Kick-off meeting* pada tanggal 9 September 2022

akan dihadapi selama proses penyusunan peta jalan ini. *Kick off meeting* dilaksanakan pada tanggal 9 September 2022 dipimpin oleh *project leader*. *Output* dari kegiatan ini adalah pelaksanaan *kick off meeting* sebagai tanda dimulainya proyek perubahan. Bukti pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada link berikut <https://bit.ly/Evidence2>.

### 3. Analisis sebaran dan dampak PMK

Sebaran dan dampak PMK saat ini memaparkan sejarah PMK di Indonesia, mulai dari pertama kali terkena PMK kemudian dinyatakan bebas PMK hingga terkena PMK kembali pada April tahun 2022. Selain itu, analisis sebaran dan dampak PMK saat ini juga menggambarkan kondisi PMK terkini, baik secara global, regional (asia pasifik) maupun kondisi PMK terkini di Indonesia. Analisis sebaran dan dampak PMK saat ini dilakukan dengan metode studi dokumentasi (*desk research*) berdasarkan dokumen atau berita resmi yang dikeluarkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH), badan kesehatan hewan Asia Pasifik dan China (SEAC-FMD) maupun Direktorat Jenderal PKH, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Mengumpulkan dan analisis data sekunder dilakukan pada tanggal 23 September 2022.



Gambar 14. Undangan Pengambilan Data Sekunder pada tanggal 23 September 2022



Gambar 15. Dokumentasi Pengumpulan Analisis Data Sekunder Pada Tanggal 23 September 2022

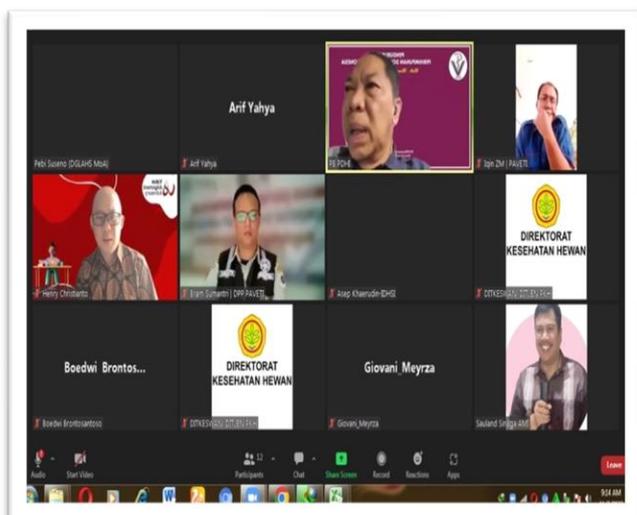
Selain pengumpulan dan analisis data sekunder. Analisis ini juga melibatkan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pakar komisi ahli kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner dan karantina hewan pada Dirjen peternakan dan kesehatan hewan untuk mengetahui sebaran dan dampak PMK yang terjadi di Indonesia. Kegiatan FGD dengan pakar yang dilakukan pada tanggal 26 September 2022.



Gambar 16. Kegiatan FGD dengan pakar yang dilakukan pada tanggal 26 September 2022

Untuk analisis sebaran dan dampak PMK saat ini di Indonesia, dilakukan juga analisis dampak sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan akibat munculnya PMK. Analisis dampak ini dilakukan dengan metode *indepth interview* dengan organisasi maupun asosiasi peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia, meliputi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI), Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI), Ikatan Sarjana Peternak Indonesia (ISPI), Paramedik Veteriner Indonesia (Paravetindo), Ikatan Paramedik Veteriner Indonesia (IPAVETI), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), Asosiasi Dokter Hewan Monogastrik Indonesia (ADHMI), Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI) dan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI). Selain itu, *indepth interview* kepada peternak kecil, menengah dan besar di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Hasil *indepth interview* dianalisis menggunakan *pattern analysis* dan *hermeneutics analysis* untuk melihat konsistensi pola jawaban yang sama, baik konteks maupun substansinya.

FGD dampak PMK bagi asosiasi yang dilakukan melalui *indepth interview* langsung dengan peternak dan asosiasi peternakan Kesehatan hewan yang dilaksanakan pada tanggal 3 November tahun 2022 secara daring. Output dari kegiatan ini adalah



Gambar 17. FGD dampak PMK bagi asosiasi pada tanggal 3 November tahun 2022 secara daring.



serta hasil FGD terkait rekomendasi evaluasi penanggulangan PMK yang telah dilaksanakan. Bukti pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain: <https://bit.ly/Evidence4a> ; <https://bit.ly/Evidence4b>



Gambar 19. Dokumentasi Pemetaan Kebijakan Pada Tanggal 26 September 2022

#### 5. Analisis *benchmarking* terhadap *best practice* penanggulangan PMK di Negara lain

Analisis berikutnya adalah studi banding terhadap pengendalian PMK yang dilakukan oleh negara lain, meliputi New Zealand, Brazil, serta negara-negara di kawasan South East Asia and China (SEAC-FMD). Analisis ini menggunakan metode *indepth interview* melalui sesi konsultasi secara luring (*offline*) dengan Brazil New Zealand dan negara-negara yang tergabung dalam SEAC FMD. Selain itu dilakukan juga studi dokumentasi (*desk research*) pengendalian PMK di negara-negara tersebut kemudian mengambil *lesson learned* untuk pengendalian PMK di Indonesia.



Gambar 20. Analisis Penanggulangan PMK pada Negara Menuju Bebas PMK (Brazil) pada tanggal 12 September 2022

Tahap ini dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu Analisis penanggulangan PMK pada negara yang proses menuju bebas PMK (Brazil) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022, Delegasi Brazil dipimpin oleh *Minister of Agriculture, Livestock and Supply, Marcos Montes Cordeiro* dan *tim Secretary of Agricultural Defense, José Guilherme Tollstadius Leal; Assistant Secretary of Commerce and International Relations, Fernando Sardenberg Zelner Gonçalves; Head of Embrapa's International Relations Office, Alexandre Morais do Amaral*. Dalam pertemuan tersebut dilakukan paparan oleh pemerintah Brazil tentang pengendalian PMK di Brazil dan Langkah Langkah yang dipakai untuk pencapaian Brazil Bebas PMK pada Tahun 2026.

Selanjutnya karena Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan *South East Asia China FMD* pada tanggal 3-5 Oktober 2022 di Bali, maka kami memanfaatkan kegiatan tersebut untuk bisa melaksanakan *benchmarking* dari negara anggota SEAC-FMD. Kementan menyampaikan, Indonesia bersama Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) mendorong kolaborasi negara-negara di Asia Tenggara dan China dalam penguatan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pertemuan SEACFMD ini sangat penting dalam mendorong program pengendalian PMK khususnya bagi Indonesia sebagai negara anggota yang baru terdampak PMK.



Gambar 21. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan *South East Asia China FMD* pada tanggal 3-5 Oktober 2022 di Bali

Pertemuan SEACFMD ini dihadiri oleh 12 negara anggota SEACFMD, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, China dan Mongolia serta negara-negara tetangga kawasan seperti Timor Leste, Jepang, dan Korea Selatan. Tujuan pertemuan ini untuk memberikan informasi mengenai situasi terkini PMK secara global dan regional di antara negara-negara anggota, serta berbagai perkembangan pengendalian di negara masing-masing. Hasil dari pertemuan ini dapat mengarahkan, sekaligus memberikan rekomendasi terbaik untuk mengendalikan PMK di Indonesia, serta memberikan panduan dalam perjalanan pemberantasan penyakit PMK di Indonesia. Adapun link berita terkait kegiatan tersebut <https://rm.id/baca-berita/government-action/143343/indonesia-gandeng-woah-perkuat-kolaborasi-pengendalian-pmk>.

Analisis *benchmarking* selanjutnya dengan negara kepulauan yang bebas PMK (New Zealand) yang dilaksanakan pada 12 Oktober 2022. Dalam pertemuan tersebut Pemerintah New Zealand akan menawarkan beberapa bantuan teknis dalam pemberantasan PMK di Indonesia, serta memperkuat *border control* untuk mencegah pemasukan stain virus PMK lainnya. Bukti pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada: <https://bit.ly/Evidence5a> ; <https://bit.ly/Evidence5b> ; <https://bit.ly/Evidence5c>



Gambar 22. Analisis penanggulangan PMK pada negara menuju bebas PMK (New Zealand) pada tanggal 12 Oktober 2022

## 6. *Expert judgement* penanggulangan PMK di Indonesia

*Expert judgement* adalah teknik di mana penilaian diberikan berdasarkan serangkaian kriteria dan/atau keahlian tertentu yang telah diperoleh di bidang pengetahuan tertentu, area aplikasi, atau area produk, disiplin ilmu tertentu, industri dalam hal ini *Expert judgement* penanggulangan PMK memakai Teknik analisis resiko yang telah ditentukan oleh organisasi Kesehatan dunia OIE/WHO yang mengidentifikasi Analisa resiko yang akan digunakan untuk strategi pemberantasan PMK di Indonesia. Strategi tersebut digunakan berdasarkan *Progresif Control Pathway-Foot Mouth Disease (PCP-FMD)*. Tahap ini dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu Analisis penanggulangan PMK antara lain;



Gambar 23. Dokumentasi penyusunan *Roadmap*/pembuatan pelaksanaan kebijakan PMK pada tanggal 10 Oktober 2022

### a. Pembuatan pelaksanaan kebijakan PMK

Dalam hal pelaksanaan kebijakan PMK di dasarkan suatu rencana kegiatan dan rencana aksi yang disesuaikan dengan acuan yang telah dibuat oleh OIE/WOAH yaitu PCP-FMD. Dalam pelaksanaan kegiatan FGD tersebut di dapatkan beberapa masukan dan kesepakatan anatar lain membuat indikator untuk verifikasi suatu negara mencapai tahapan tertentu, pendekatan PCP harus pada

negara endemis Karena negara bebas mengikuti aturan OIE yang lain; PCP terutama yang pendekatan vaksinasi.

**b. *Depth Interview* Peternak terdampak**

Strategi berikutnya untuk menganalisis suatu dampak PMK Nasional dilakukan dengan melakukan *interview* kepada peternak masyarakat untuk pengumpulan informasi guna membuat suatu kebijakan khusus terkait adanya wabah PMK. Interview dilakukan kepada kelompok ternak di Pulau Jawa khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur karena populasi ternak terbanyak berada di pulau Jawa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4-5 November 2022. Adapun *evidence* terkait kegiatan dimaksud sebagai berikut <https://bit.ly/Evidence6a> ; <https://bit.ly/Evidence6b> ; <https://bit.ly/Evidence6c>.



Gambar 24. Proses wawancara dengan peternak pada kelompok ternak II

**7. Identifikasi Standar International Penanggulangan PMK yang dikeluarkan WOAHO/OIE**

Tahap berikutnya adalah melakukan identifikasi terhadap

Standar International Penanggulangan PMK berdasarkan *the global FMD control strategy* yang dikeluarkan oleh WOAHO/OIE. Langkah ini diperlukan karena strategi pemberantasan PMK disusun dengan mempertimbangkan *the global FMD strategy* yang dikeluarkan oleh organisasi Kesehatan hewan dunia (WOAH) yang didalamnya terdapat panduan pengendalian PMK secara bertahap yaitu *Progressive Control Pathway Foot and Mouth Disease (PCP-FMD)* serta penguatan layanan veteriner dalam mendukung pengendalian PMK yaitu *Performance of Veterinary Services (PVS)*. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan asesmen mandiri kondisi pengendalian PMK saat ini, baik berdasarkan tahapan PCP-FMD maupun kompetensi kritis PVS. Tahap ini dilakukan menggunakan metode studi dokumentasi (*desk research*) maupun FGD dengan pejabat eselon II serta koordinator dan sub koordinator di lingkungan Ditjen PKH maupun Badan Karantina Pertanian.



Gambar 25. Identifikasi dan analisis standar internasional PMK

Tahap ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu Identifikasi dan analisis standar internasional PMK yang dilaksanakan tanggal 24 Oktober hingga 26 Oktober 2022 serta analisis kondisi saat ini berdasarkan tahapan PCP-FMD dan OIE PVS yang dilaksanakan tanggal 2 November 2022. Output dari kegiatan ini adalah hasil identifikasi terhadap *the global FMD control strategy* yang didalamnya meliputi PCP-FMD dan OIE PVS *tools*.

## 8. Validasi strategi penanggulangan PMK



Gambar 26. Validasi strategi penanggulangan PMK pada tanggal 2 November 2022

Strategi Pemberantasan PMK disusun berdasarkan *the global FMD strategy* yang dikeluarkan oleh organisasi Kesehatan hewan dunia (WOAH) yang didalamnya terdapat panduan pengendalian PMK secara bertahap yaitu *Progressive Control Pathway Foot and Mouth Disease (PCP-FMD)* serta penguatan layanan veteriner dalam mendukung pengendalian PMK yaitu *Performance of Veterinary Services (PVS)*. Strategi Pemberantasan PMK juga divalidasi oleh pakar kesehatan hewan maupun peternakan melalui serangkaian *Focus Group Discussion (FGD)*. Hasil formulasi strategi kemudian dijabarkan menjadi kerangka logis Peta Jalan (*roadmap*) Pemberantasan PMK tahun 2023-2035, visi, misi, strategi, kegiatan hingga rencana aksi pemberantasan PMK.

Tahap ini dilaksanakan melalui FGD dalam melakukan validasi draft strategi yang disusun untuk melihat konten dan konteks strategi yang diformulasikan. Validasi dilakukan oleh pejabat maupun koordinator dan sub koordinator lingkup Ditjen PKH dan Badan Karantina Pertanian berdasarkan analisis dan bukti yang sudah dihasilkan pada tahap sebelumnya. FGD validasi strategi dilaksanakan

pada tanggal 2 November 2022. *Output* yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah hasil validasi strategi penanggulangan PMK.

**9. FGD menentukan kegiatan, rencana aksi serta indikator keberhasilan pemberantasan PMK.**

Langkah berikutnya adalah merumuskan kegiatan, rencana aksi serta indikator keberhasilan pemberantasan PMK berdasarkan kerangka logis (rumah strategi) pemberantasan PMK yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. Kegiatan dijabarkan berdasarkan setiap strategi dalam mencapai tujuan strategis untuk mewujudkan Visi. Rencana aksi merupakan penjabaran atas setiap kegiatan dalam mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan.



Gambar 27. *Forum Group Discussion* (FGD) Pemberantasan PMK  
Pda Tanggal 10-12 November di Bogor

Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 10 November hingga 12 November 2022 melalui FGD dengan pejabat maupun koordinator dan sub koordinator lingkup Ditjen PKH dan Badan Karantina Pertanian. *Output* dari kegiatan ini adalah kegiatan, rencana aksi serta indikator keberhasilan pemberantasan PMK yang telah disepakati.

## 10. FGD Peta jalan pemberantasan PMK nasional dengan K/L



Gambar 28. *Focus Group Discussion* (FGD) Peta Jalan Pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jakarta Selatan

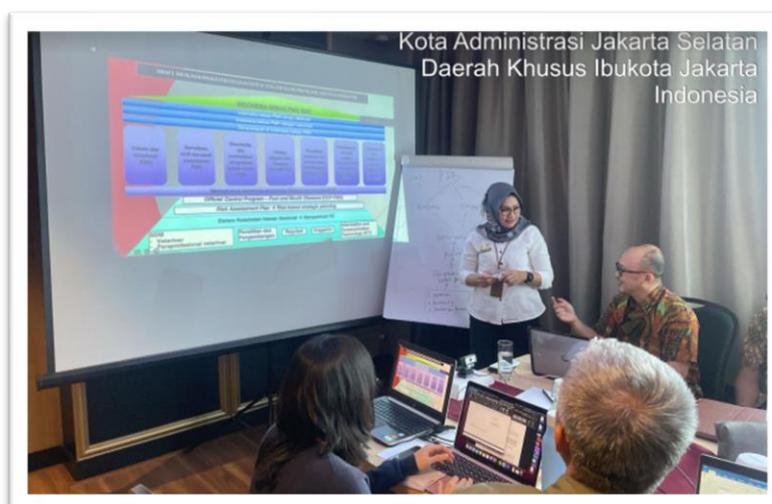
Tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi dan finalisasi peta jalan pemberantasan PMK nasional dengan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terkait. Tahap ini dilakukan melalui FGD dengan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki keterkaitan dan dapat memberikan kontribusi bagi pemberantasan PMK nasional. Tahap ini dilakukan pada tanggal 17 November 2022 dengan FGD yang dihadiri oleh Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) secara *daring* maupun *luring*. Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang hadir dan memberikan pendapat diantaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, beberapa unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian juga memberikan pendapat seperti dari Biro Perencanaan dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian serta Badan Karantina Pertanian.

*Output* kegiatan ini adalah draft final penyusunan Peta Jalan (*roadmap*) Pemberantasan PMK.

## 11. Pembuatan dan pembahasan naskah Kepmentan peta jalan pemberantasan PMK

Tahap berikutnya adalah pembuatan dan pembahasan naskah Kepmentan peta jalan pemberantasan PMK. Pembuatan dan pembahasan yang dilakukan meliputi naskah akademik hingga *legal drafting* Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Peta Jalan (*roadmap*) pemberantasan PMK. Tahap ini dilaksanakan pada 15 November 2022. *Output* kegiatan ini adalah *legal drafting* Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Peta Jalan (*roadmap*) pemberantasan PMK.



Gambar 29. *Draft* final penyusunan Peta Jalan (*roadmap*) Pemberantasan PMK di Jakarta Selatan

## 12. Sosialisasi peta jalan pemberantasan PMK

Tahap berikutnya adalah melakukan sosialisasi terkait naskah akademik maupun Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Peta Jalan (*roadmap*) pemberantasan PMK dengan unit kerja di

lingkungan Kementerian Pertanian. Sosialisasi dilakukan untuk memastikan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian naskah akademik maupun Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Peta Jalan (*roadmap*) pemberantasan PMK. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022 dengan metode sosialisasi tatap muka (*daring*) maupun secara luring (*online*). *Output* dari tahap ini adalah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi.



Gambar 30. Sosialisasi Peta Jalan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku Nasional di Bogor

### 13. Penetapan Keputusan Menteri Pertanian tentang peta jalan Pemberantasan PMK

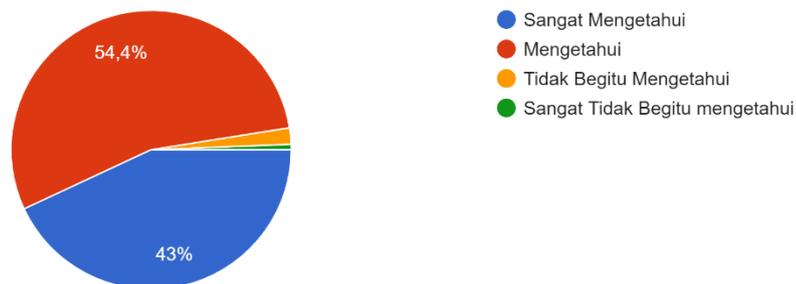
Tahap berikutnya adalah penetapan Keputusan Menteri Pertanian tentang peta jalan pemberantasan PMK. Kegiatan yang dilakukan adalah harmonisasi internal atas *legal drafting* Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Peta Jalan (*roadmap*) pemberantasan PMK dengan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian serta pengajuan pengesahan kepada Menteri terkait Rancangan Keputusan Menteri Pertanian yang dilaksanakan pada 22 November 2022. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah koordinasi dan harmonisasi. *Output* yang dihasilkan adalah Keputusan Menteri Pertanian tentang Peta Jalan (*roadmap*) pemberantasan PMK yang sudah ditandatangani Menteri. Bukti

pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Dokumen Keputusan Menteri Pertanian tentang Peta Jalan (*roadmap*) pemberantasan PMK yang sudah ditandatangani Menteri.

## MANFAAT

Manfaat dari proyek perubahan ini digambarkan dengan dengan melakukan survey secara *online* terhadap K/L lain dan seluruh *stakeholder* terkait dibidang peternakan dan Kesehatan hewan. Metode pengambilan data dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait dengan kebutuhan dari K/L lain dan *stakeholder* terkait dibidang peternakan dan Kesehatan hewan melalui metode survey online dalam kegiatan Sosialisasi Peta Jalan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku Nasional, survei tersebut dilakukan pada 53 koresponden, adapun hasil *survey* dapat diakses melalui <https://bit.ly/QuisionerPetajalanPMK> dilihat dibawah ini.

Apakah Saudara Mengetahui tentang Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak Berkuku Belah?  
158 jawaban

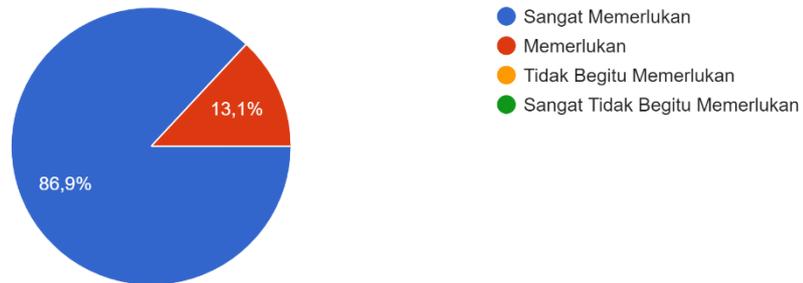


Gambar 31. Diagram kuisisioner terkait pemahaman koresponden terhadap PMK.

Pada diagram tersebut yang di lihat pada gambar 31 menerangkan pertanyaan untuk mengukur pengetahuan koresponden terkait Penyakit Mulut dan Kuku. Dapat dijelaskan pada gambar 31, bahwa sebagian besar koresponden mengetahui sampai sangat mengetahui pengetahuan mengenai Penyakit Mulut dan Kuku.

Apakah Menurut Saudara Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak Berkuku Belah Memerlukan Suatu Penanganan?

160 jawaban

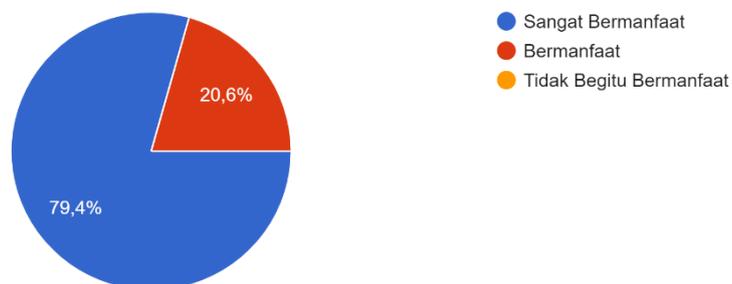


Gambar 32. Diagram kuisisioner terkait dampak PMK.

Diagram pada gambar 32 Mengukur dampak penyakit mulut dan kuku pada masyarakat dan pentingnya suatu strategi penanganan penyakit yang dituangkan dalam suatu pedoman atau peta jalan pada proyek perubahan ini. Pada gambar 32 koresponden sebagian besar menjawab sangat memerlukan suatu penanganan pada kasus PMK, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa koresponden merasa sangat terdampak dengan adanya PMK dan membutuhkan suatu tindakan penanganan pada kasus PMK

Apakah Peta Jalan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak Berkuku Belah bermanfaat?

160 jawaban



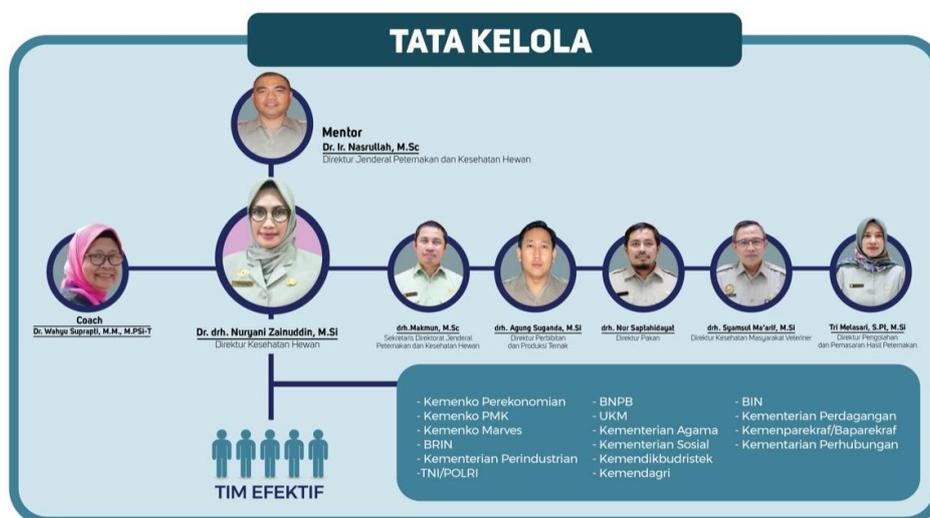
Gambar 33. Diagram kuisisioner terkait dampak PMK

Pada pertanyaan ke 3 sesuai dengan gambar 33 mengetahui kebutuhan dari masyarakat terkait dengan adanya peta jalan ini. Pada diagram tersebut Sebagian besar dari koresponden menjawab sangat bermanfaat yang berarti koresponden tersebut sangat membutuhkan Peta Jalan proyek perubahan ini.

## II.B. Kepemimpinan Strategis

Kepemimpinan strategis menjadi bagian yang sangat penting dari implementasi proyek perubahan ini. Seorang proyek *leader* harus memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menyelesaikan proyek perubahan sesuai dengan waktu yang diberikan. Kepemimpinan strategis termasuk didalamnya kemampuan Manajemen Strategis yang penting diterapkan dalam konteks organisasi mengingat begitu dinamisnya dinamika dan tantangan pemerintahan terkini.

Pada saat kondisi wabah PMK yang melanda Indonesia, maka sebagai Sebagai Direktur Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab dalam pengendaliannya, maka proyek *leader* memanfaatkan peluang ini untuk mensinkronkan proyek perubahan ini dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk pembuatan peta jalan pembebasan PMK Nasional yang sekaligus mendukung tugas fungsi dan kondisi terkini. Sehingga implementasi dari proyek perubahan jangka pendek yang saat ini dilaksanakan dapat terlaksana secara efektif an efisien.



Gambar 34. Tata Kelola proyek perubahan

Penjelasan tentang tugas-tugas dari setiap anggota tim efektif adalah sebagai berikut:

**a) *Sponsor Mentor:***

- Memberikan arahan terkait jenis perubahan, rencana, dan pelaksanaan secara keseluruhan proyek perubahan.
- Membantu *project leader* untuk mendapatkan sumber daya dalam pelaksanaan proyek perubahan.
- Membantu *project leader* untuk menyelesaikan permasalahan diluar kewenangan *project leader*.

**b) *Coach***

- Memberikan bimbingan tentang jenis perubahan yang akan dilakukan oleh *project leader*.
- Membimbing dan memantau serta memberikan arahan tentang pelaksanaan proyek perubahan.

**c) *Project Leader***

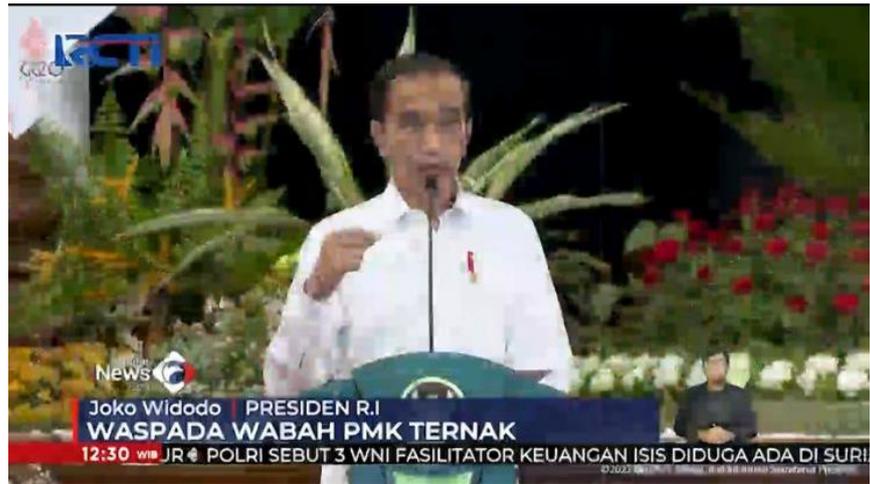
- Merencanakan jenis inovasi yang akan dilakukan.
- Membangun tim yang akan melaksanakan inovasi/proyek perubahan.
- Menyiapkan, mengelola dan mengatur secara administrasi seluruh kegiatan proyek perubahan.
- Melaporkan progress proyek perubahan.

**d) *Koordinator dan anggota tim Efektif***

Bertugas membantu *project leader* untuk persiapan, Menyusun kegiatan, dokumentasi dan pengumpulan data- data dan bukti proyek perubahan.

**e) *K/L terkait***

Kementerian/Lembaga terkait dalam peta jalan tersebut akan memberikan saran serta masukan dalam peta jalan pemberantasan penyakit mulut dan kuku untuk berkoordinasi dalam pengimplementasi peta jalan tersebut, dalam implementasi Proyek perubahan *Project Leader* melakukan koordinasi dan konsultasi dengan beberapa, diantaranya :



Gambar 35. Konferensi pers Presiden RI terkait wabah PMK



Gambar 36. Pernyataan dari Menteri Pertanian Terkait adanya Wabah PMK



Gambar 37. Konsultasi terkait proyek perubahan Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional dengan mentor selaku Dirjen PKH



Gambar 38. Proses Diskusi bersama *Coach* Dr. Wahyu Suprpti, MM, M. Psi-T mengenai penyusunan proyek perubahan



Gambar 39. Konsultasi dan koordinasi dengan Presiden OIE/WOAH Pada Kongres *7<sup>th</sup> One Health* untuk pengendalian PMK



Gambar 40. Konsultasi terkait penanganan PMK dengan mantan Dirjen PKH



Gambar 41. Kunjungan kerja bersama wakil Gubernur Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Barat untuk berkoordinasi dan berkonsultasi terkait strategi Pemberantasan PMK



Gambar 42. Kunjungan kerja dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi pengendalian PMK



Gambar 43. Testimoni Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Karantina Hewan terkait penyusunan Peta Jalan Pemberantasan PMK.



Gambar 44. Testimoni Animal Health Adviser AIHSP terkait penyusunan Peta Jalan Pemberantasan PMK.



Gambar 45. Testimoni dari Sub Regional Representative OIE/WOAH terkait penyusunan Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional.



Gambar 46. Testimoni dari Koordinator FMD Nasional (Malaysia)

## II.C. Implementasi Strategi Marketing

Penyusunan Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional terbagi dalam beberapa kegiatan utama antara lain:

### 1. *Kick of meeting*

Kegiatan *kick of meeting* dilaksanakan untuk menginformasikan urgensi dan mendapatkan dukungan untuk penyusunan peta jalan pemberantasan PMK Nasional kepada seluruh K/L dan stakeholder terkait lainnya dalam memberikan arah untuk mendapatkan Kembali status bebas PMK Indonesia. Masukan dari seluruh K/L dan stakeholder terkait menjadi bahan masukan dalam setiap tahapan penyusunan peta jalan ini

### 2. Analisis sebaran dampak PMK

Strategi pembebasan PMK disusun dengan mempertimbangkan analisis sebaran dan dampak PMK bagi Indonesia dari berbagai perspektif, meliputi politik, ekonomi hingga sosial. Dengan demikian melibatkan para peternak, asosiasi, Non pemerintah dan K/L terkait tidak bisa terlepas dari penyusunan peta jalan pembebasan PMK nasional.

**3. Analisis penanggulangan PMK yang sudah dilakukan sampai saat ini**

Strategi pembebasan PMK juga disusun dengan melihat upaya yang sudah dilakukan saat ini dalam mengatasi wabah PMK yang terjadi semenjak bulan April tahun 2022 hingga saat peta jalan ini disusun, sebagai bahan masukan dalam penyusunan peta jalan ini.

**4. Analisis *bench marking* terhadap *best practice* penanggulangan PMK di Negara lain**

Strategi pembebasan PMK juga mengadopsi keberhasilan beberapa negara di dunia dalam menangani PMK.

**5. *Expert judgement* penanggulangan PMK di Indonesia**

Strategi pembebasan PMK yang dihasilkan juga telah divalidasi oleh pakar/praktisi kedokteran hewan (*expert judgement*) dan sudah diselaraskan dengan standar internasional pembebasan PMK yang berlaku dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara bebas PMK.

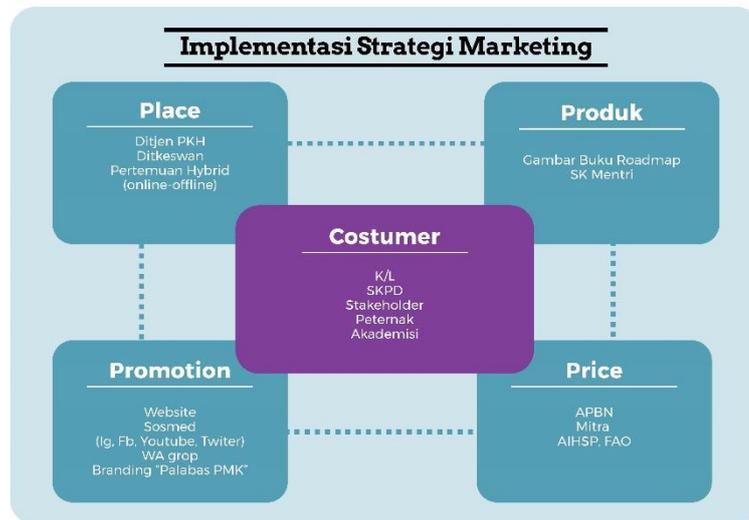
**6. Identifikasi Standar International Penanggulangan PMK berdasarkan WOAHA (*World Organization Animal Health*)**

Standar internasional yang dimaksud adalah *The global FMD control strategy* sebagai panduan umum dalam membebaskan suatu negara dari PMK, dimana didalamnya terdapat 2 (dua) *tools* yang digunakan dalam mewujudkan negara bebas PMK tersebut, yaitu PCP-FMD (komponen strategi 1) serta PVS *tools* (komponen strategi 2).

**7. Menentukan Program, kegiatan, sub Kegiatan serta indikator keberhasilan pemberantasan PMK**

Hasil formulasi strategi pembebasan PMK yang telah dilakukan kemudian dijabarkan menjadi kegiatan dan rencana aksi dalam mewujudkan peta jalan (*roadmap*) pembebasan PMK yang disepakati menuju Indonesia bebas PMK. Strategi, kegiatan dan rencana aksi yang dihasilkan kemudian diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan menghasilkan masukan untuk dokumen perencanaan pembangunan nasional saat ini maupun perencanaan yang akan datang, baik Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Kegiatan ini dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan seluruh K/L dan *stakeholder* terkait lainnya sebelum naskah akademik Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional di tetapkan.



Gambar 47. Bagan impementasi strategi *marketing* 4P 1C.

Dalam implementasi proyek perubahan ini dilakukan serangkaian marketing sektorpublik serta strategi komunikasi dengan *stakeholder*. Dengan demikian proyek perubahan ini menghasilkan sebuah perubahan yang terkait dengan Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional yang didukung oleh *stakeholder* yang memiliki tingkat ketertarikan dan tingkat pengaruh yang tinggi. Dalam implementasi strategi.

Pengelompokan *stakeholders* yang terbagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Kelompok *promotors (High influence/high interest Stakeholder)*, yaitu kelompok/*stakeholder* yang memiliki kepentingan besar terhadap program proyek perubahan dan juga kekuatan untuk membantu keberhasilan proyek perubahan atau sebaliknya menggagalkan proyek perubahan.
2. Kelompok *latens (High influence /low interest Stakeholder)*, yaitu kelompok/*Stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan khusus

maupun terlibat dalam kegiatan tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program proyek perubahan jika tertarik.

3. Kelompok *defenders (Low influence/high interest Stakeholder)*, yaitu kelompok/*stakeholder* yang memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan proyek perubahan.
4. Kelompok *apathetics (Low influence/low interest Stakeholder)*, yaitu kelompok/*stakeholder* yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan dalam proyek perubahan bahkan bisa juga tidak mengetahui adanya kegiatan proyek perubahan.

Dari 4 pengelompokan stakeholder tersebut akan disusun strategi marketing sector public yang memuat konsep 4P dan 1C yang dijelaskan pada Bab 1 F.3.

#### 1. *Output* Jangka Pendek

Pada *output* jangka pendek ditentukan dengan membuat prioritas kerja untuk mendukung program jangka menengah dan jangka Panjang. *Output* dari proyek perubahan ini adalah

- Buku Peta Jalan Pemberantasan PMK di Indonesia (Gambar Buku)



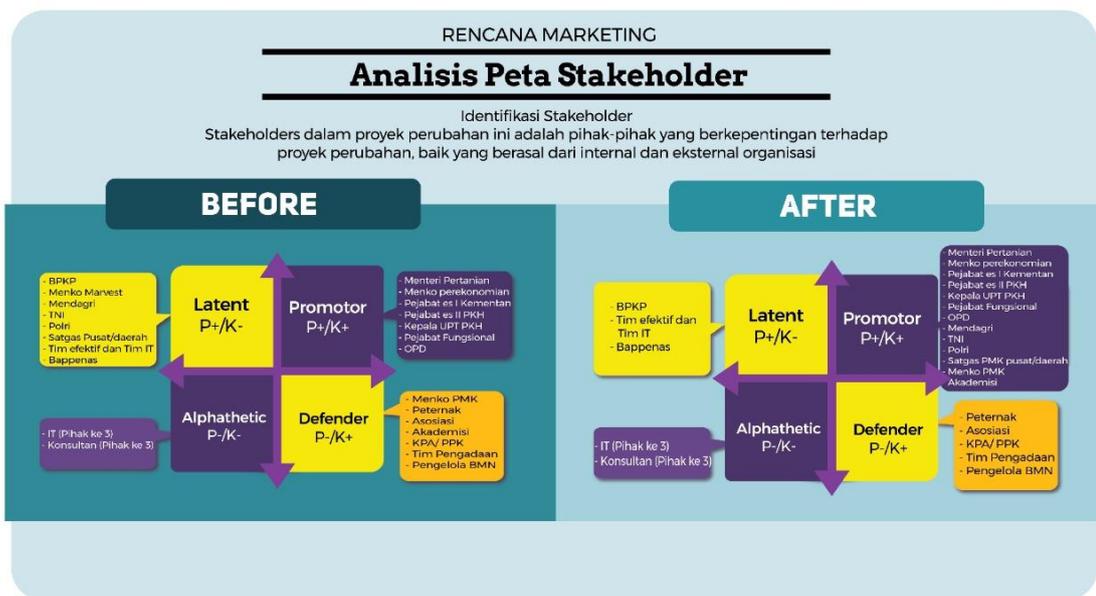
Gambar 48. Buku *Roadmap* Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku

- Surat Keputusan Menteri Pertanian (Gambar SK Menteri)



Gambar 49. Surat Keputusan Menteri Pertanian

## 2. Peta Stakeholder



Gambar 50. Peta Perubahan Stakeholder.

- Strategi *Marketing* yang digunakan dalam implementasi proyek perubahan menggunakan strategi *pathnership*, strategi ini untuk mendukung keberhasilan pemasaran proyek perubahan dengan cara kolaborasi yang erat dengan *stakeholder*. Untuk strategi *marketing* mengalami perubahan pada peta stakeholder seperti pada gambar 3), dimana perubahan terdapat pada kelompok laten dimana kelompok laten tersebut kelompok/*Stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun

terlibat dalam kegiatan tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan dan perubahan tersebut pada kelompok laten yang menjadi BPKP, tim efektif dan IT serta Bapenas sedangkan tim promotor menjadi ada tambahan Kemenko marves dan TNI/Polri serpri yang terlihat pada gambar 50.

## II.D. Keberlanjutan Proyek Perubahan

Dalam penyusunan proyek perubahan ini, Dirjen PKH selaku mentor selalu mendukung setiap pelaksanaan tahapan kegiatannya. Demikian juga Direktorat teknis lain lingkup Dirjen PKH. K/L dan *stakeholder* terkait lainnya juga mendukung segera ditetapkan menjadi regulasi resmi yang mengikat K/L dan *stakeholder* lainnya agar K/L terkait bisa mengambil bagian dalam mendukung pemberantasan PMK Nasional.

Negara yang tergabung dalam *South East Asia and China for Foot and Mouth Disease* juga mendukung Indonesia dalam upaya Menyusun peta jalan pembebasan PMK nasional sebagai bagian dari program resmi pengendalian PMK di Indonesia untuk kemudian diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WOAH).

Adapun dukungan terhadap proper ini tentang keberlanjutan proper:



Gambar 51. Surat Dukungan Untuk proyek Perubahan Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional dari Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

**SURAT DUKUNGAN**  
 Nomor : 2106C / Hk. 160 / F5 / 11 / 2022

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drh. Syamsul Ma'arif, M.Si  
 NIP : 196407071990031014  
 Jabatan : Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dengan ini mendukung Peta Jalan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional Tahun 2023-2035 sebagai dokumen program pemberantasan PMK resmi di Indonesia dalam upaya mewujudkan Kembali Indonesia sebagai negara bebas PMK.

Dokumen peta jalan ini menjadi acuan nasional dalam melaksanakan pemberantasan PMK sesuai persyaratan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) untuk dapat diakui sebagai negara bebas PMK serta acuan bagi Kementerian Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)/Pemerintah Daerah (Pemda) atau K/L/D dalam mendukung pemberantasan PMK sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dokumen ini juga merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pemberantasan PMK di lapangan.

Peta Jalan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional Tahun 2023-2035 ini akan menjadi panduan bersama dalam pelaksanaan program pengendalian PMK dengan tata cara dan tahapan yang jelas, terarah dan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Demikian surat dukungan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 November 2022

  
 Drh. Syamsul Ma'arif, M.Si  
 NIP-196407071990031014

**Gambar 52. Surat dukungan untuk proyek Perubahan Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional dari Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner**



**Gambar 53. Surat dukungan untuk proyek Perubahan Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional dari Partnership Government Food Agricultur Organization.**



Gambar 54. Surat dukungan untuk proyek Perubahan Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional dari Direktur Pakan Ternak.



Gambar 55. Surat Dukungan Untuk proyek Perubahan Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional dari Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.



Gambar 56. Surat Dukungan Untuk proyek Perubahan Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional dari Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.



Gambar 57. Surat Dukungan Untuk proyek Perubahan Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional dari Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.

Dr Nuryani Zainuddin, M.Si  
 Director Animal Health  
 Directorate General of Livestock and Animal Health Services  
 Ministry of Agriculture  
 Jakarta

21 November 2022

To whom it may concern

**Reference: Letter endorsing leadership of Dr Nuryani Zainuddin in the preparation of a roadmap for the control of Foot and Mouth Diseases (FMD)**

In May 2022, outbreaks of FMD were reported in East Java and Aceh provinces and a national emergency was quickly declared; note that Indonesia has been free of FMD since 1986. Internationally FMD is the most feared disease of livestock as it is highly infectious, spreads rapidly, affects multiple species (cattle, buffalo, pigs, sheep and goats) causes major morbidity and significant mortality and disrupts livestock trade, food security and economic activity. FMD has since spread to 23 provinces in Indonesia.

Containing outbreaks of FMD is very challenging. It is necessary to consider the disease epidemiology, that is the risk factors, for the disease spread, the affected populations, community structures and well-being, the livestock trade and how best to optimize disease control. Such an approach, termed a roadmap, must set out the disease situation and the control measures to be undertaken and is absolutely critical if there is to be any chance of implementing effective control of FMD. Note that the control of FMD is internationally recognised as being extremely difficult.

Under the leadership of Dr Nuryani Zainuddin, a roadmap for the control of FMD was quickly drafted and has subsequently been refined – this is very necessary in a rapidly evolving disease situation. Dr Nuryani Zainuddin very ably chaired and facilitated a series of workshops that brought together a wide range of national and international technical expertise to prepare the roadmap. The roadmap is a comprehensive plan for the control of FMD covering the technical details for effective disease control identifying the need for improved surveillance and engagement with producers and stakeholders and the complex tasks of risk reduction and the use of vaccination. The roadmap also references the need for comprehensive approaches with support from across government and the private sector.

I would like to commend Dr Nuryani Zainuddin for the leadership she has been able to provide in the preparation of the roadmap for the control of FMD in Indonesia.



**Dr John Weaver**  
 Animal Health and Epidemiology Adviser, AHSIP  
 Chair of the group for PVS and Veterinary Services, World Organisation for Animal Health  
 International Animal Health and One Health Consultant, World Bank and FAO

Gambar 58. Surat Dukungan Untuk proyek Perubahan Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional dari *Australia Indonesia Health Security Partnership*.

## II.E. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran (*Learning Organization*)

Organisasi pembelajaran (*Learning organization*) adalah menggambarkan suatu organisasi sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dan senantiasa selalu berubah, karena individu-individu anggota organisasi tersebut mengalami proses belajar, yang dilandasi oleh budaya kerjanya. Peter Senge dalam terjemahan (2006: 21) mengartikan *learning organization* dapat diartikan organisasi pembelajar dimana pegawai didalamnya secara terus menerus memperbesar kapasitasnya untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Organisasi dimana pola berfikir yang baru dan luas dipelajari. Organisasi dimana aspirasi kelompok dibebaskan. Dan organisasi dimana individu didalamnya mempelajari bagaimana belajar bersama.

Peter Senge mendefinisikan *learning organisation* adalah organisasi dimana pegawainya secara berkelanjutan mengembangkan kapasitasnya untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan, pola berfikir baru dan ekspansif ditumbuhkembangkan, keinginan bersama diberi ruang kebebasan dan

pegawai secara terus menerus belajar bersama. Peter Sange juga mengatakan bahwa bekerja sebagai proses belajar berkelanjutan yang membentuk masa depan, bukan merupakan reaksi terhadap masa lampau. Sementara David Garvin mendefinisikan organisasi pembelajar sebagai organisasi yang mahir menciptakan, memperoleh, menginterpretasikan, mentransfer dan mempertahankan pengetahuan.

Direktorat Kesehatan Hewan berusaha menerapkan *learning organization* dalam pencapaian salah satu tugas organisasi yaitu tersedianya Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional yang menjadi panduan Kementerian Pertanian dan K/L terkait. Diantaranya dengan pembangunan rancangan proyek perubahan. Hal ini diawali dengan membangun komunikasi dengan seluruh unsur yang ada di internal di Direktorat Kesehatan Hewan untuk merumuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana mengerjakan apa yang dipahami. Rancangan Proyek Perubahan dikomunikasikan secara internal, pembentukan Tim Efektif internal yang melibatkan perwakilan es 2 lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga implementasi proyek perubahan #Pelabas PMK #Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional.

*Learning organisation* ditandai dengan adanya pengembangan yang terus-menerus melalui ide-ide baru dari Tim, pengetahuan dan pemahaman yang baru, yang dipergunakan secara terus-menerus untuk mengantisipasi, berinovasi dan menemukan cara-cara baru yang lebih baik dalam mencapai tujuan Proyek Perubahan ini. Dalam hal ini pencapaian tujuan Direktorat Kesehatan Hewan menjadi organisasi yang adaptif dan pembelajar untuk menuju peran sebagai Garda terdepan dalam pencapaian pembebasan PMK secara nasional. Dalam implementasi proyek perubahan masing-masing staf yang ada dalam Tim melakukan tugasnya dan saling berkoordinasi dan punya kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan ide untuk pencapaian proyek perubahan, antara lain usulan fitur-fitur dalam pengembangan peta jalan, membuat konsep pedoman, bahan promosi dan konsep-konsep saat melakukan koordinasi diplomasi. Tim juga melakukan koordinasi baik dengan pihak internal Direktorat Kesehatan Hewan dan PKH juga dengan vendor dan pelaku usaha.



Gambar 59. Membangun komunikasi dengan staff



Gambar 60. Koordinasi dengan para Eselon 2



Gambar 61. Membangun koordinasi dengan staff



Gambar 62. Penyamaan Visi, Misi dan Tujuan Tim

Koordinasi, komunikasi, analisis data, validasi program, konsultasi internal dan eksternal memperkaya pengetahuan *project leader* dan Tim Efektif sebagai upaya peningkatan pelayanan pemetintah dalam memberikan jaminan penanggulangan PMK sampai dengan pengakuan status bebasnya.

II.F Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan Dengan Proyek Perubahan Optimalisasi Secara tepat seluruh mata pelatihan pilihan (3 mata pelatihan) dalam mendukung pelaksanaan proyek perubahan

1. Peningkatan Pelayanan Publik

- Kesehatan hewan merupakan bagian yang mendukung kesehatan manusia, baik dalam memberikan jaminan bebas penyakit menular zoonosis kepada manusia maupun jaminan terhadap bebas penyakit ternak yang berdampak tidak langsung pada Manusia. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan tugas untuk Perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Menghadapi wabah PMK, bukan merupakan hal yang mudah, mengingat kerugian ekonomi akibat PMK menyebabkan terjadinya penurunan Nilai Tukar Peternak di Indonesia. Untuk itu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu membuat Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional Tahun 2023-2035. Ditjen PKH sebagai institusi pemerintah diwajibkan melakukan penyelenggaraan pelayanan publik, dalam kelompok jasa dalam sektor Kesehatan hewan. Untuk itu sebagai sebuah institusi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan public maka, Ditjen PKH wajib mengimplementasikan prinsip prinsip penyediaan pelayanan publik yaitu kesederhanaan (tidak berbelit-belit), mudah dipahami dan dilaksanakan, jelas (syarat jelas), ada tempat bertanya, alur perjalanan dokumen jelas), kepastian waktu, akurasi, dll yang terkait. Negara berdiri untuk kepentingan masyarakat (memenuhi hak dan kebutuhan *dasar/fundamental right*), yang dilaksanakan melalui Pelayanan Publik. Pelayanan Publik memberikan respon dinamis untuk terjadinya perubahan yang lebih baik yang diwujudkan melalui Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk itu penyusunan proyek perubahan ini ditujukan untuk kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang lebih baik dalam menghadapi wabah PMK.
2. Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)  
Salah satu dari 9 kegiatan yang tertuang dalam Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional Tahun 2023-2035 yang merupakan hasil

dari proyek perubahan ini adalah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengendalian PMK dengan rencana aksi antara lain Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengendalian PMK. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan mata kuliah yang sejalan dalam pengendalian PMK di Indonesia. Adanya pergeseran tata Kelola pemerintahan dari *paper Government* menjadi *e-government* dan saat ini beralih menjadi *Digital Government*.

### 3. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Selain berkontribusi terhadap PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja, subsektor peternakan juga berkontribusi terhadap ketersediaan sumber kalori dan protein hewani bagi masyarakat. Produk hewani seperti daging, telur, dan susu sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kalori dan protein harian masyarakat. Namun subsektor peternakan nasional saat ini sedang menghadapi musibah dengan masuknya virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke Indonesia. Menurut *World Organization for Animal Health (WOAH)*, Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit virus ternak yang parah dan sangat menular yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Pembangunan pertanian berkelanjutan adalah pertanian berkelanjutan pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah, sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Pembelajaran pilihan terkait pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan bahwa peningkatan produktifitas peternakan di Indonesia akan cenderung tidak berkelanjutan apabila pengendalian PMK tidak dilakukan secara serius dan tepat. Sehingga pembelajaran ini sangat terkait dengan proyek perubahan yang kami buat.

## BAB III

### PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Hasil Implementasi Rencana Pengembangan Potensi Diri Sebagai Tindak Lanjut Dari *Self Assessment* Potensi Diri (penilaian terakhir oleh diri sendiri dan mentor).

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
Nama	: Nuryani Zainuddin	Nama Mentor	: Dr Ir Nasrullah, M.Sc		
NIP	: 197608262003122000	NIP:	: 196602231993031000		
Jabatan	: Direktur Kesehatan Hewan	Jabatan	: Dirjen PKH		
Instansi	: Direktorat Jendral PKH Kementan	Instansi	: Ditjen PKH Kementan		
Program	: PKN II ANGKATAN XX Tahun 2022				
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	9	8,70	Baik
	Komitmen	8	9	8,70	Baik
	Kedisiplinan	9	9	9,00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa
	Konsistensi	8	9	8,70	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	9	8,70	Baik
	<b>Rata-Rata</b>	<b>8,33</b>	<b>9,00</b>	<b>8,80</b>	<b>Baik</b>
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	8	8,00	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	8	8,00	Baik
	Komunikasi	8	8	8,00	Baik
	Fleksibilitas	8	8	8,00	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	9	8,70	Baik
		<b>Rata-Rata</b>	<b>8,00</b>	<b>8,20</b>	<b>8,14</b>
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	8	8,00	Baik
	Adaptabilitas	8	8	8,00	Baik
	Pengembangan orang lain	8	8	8,00	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8,00	Baik
	Inisiatif	8	8	8,00	Baik
		<b>Rata-Rata</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :</b>		<b>8,11</b>	<b>8,40</b>	<b>8,31</b>	<b>Baik</b>
<b>Keterangan Kualifikasi</b>					
9.99-10	: Istimewa				
7-8.99	: Baik				
5-6.99	: Cukup				
3-4.99	: Kurang				
1-2.99	: Sangat Kurang				

Gambar 63. Rekap nilai gabungan peserta dan mentor

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Nuryani Zainuddin	Nama Mentor	: Dr Ir Nasrullah, M.Sc		
NIP	: 197608262003122000	NIP:	: 196602231993031000		
Jabatan	: Direktur Kesehatan Hewan	Jabatan	: Dirjen PKH		
Instansi	: Direktorat Jendral PKH Kementan	Instansi	: Ditjen PKH Kementan		
Program	: PKN II ANGKATAN XX Tahun 2022				
	<b>Nilai Komponen</b>				
	<b>Sub Komponen Integritas</b>	<b>Sub Komponen Kerjasama</b>	<b>Sub Komponen Mengelola Perubahan</b>	<b>Rata-Rata Total Sub Komponen</b>	<b>Kualifikasi Total Sub Komponen</b>
Peserta	8,33	8,00	8,00	8,11	Baik
Mentor	9,00	8,40	8,00	8,47	Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen</b>	<b>8,80</b>	<b>8,28</b>	<b>8,00</b>	<b>8,36</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualifikasi Per Sub Komponen</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	
<b>Keterangan Kualifikasi</b>			<b>Akhir Sikap Perilaku</b>		
9.00-10	Istimewa		8,36		
7-8.99	Baik		Kualifikasi:		
5-6.99	Cukup		Baik		
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				

Gambar 64. Rekap nilai akhir sikap perilaku peserta

Pengembangan diri telah dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan rencana-rencana proyek perubahan. Pengembangan diri yang utama adalah secara tidak langsung sebagai *project leader* yang mengkoordinasikan seluruh tim efektif dalam melaksanakan proyek perubahan. Sebagai *project leader*, juga harus mampu untuk mengkomunikasikan dengan *stakeholder* proyek perubahan dengan baik untuk dapat meyakinkan bahwa proyek perubahan nantinya akan berdampak positif ke stakeholder dan dapat diterima untuk diimplementasikan. Hal penting lainnya adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya dan waktu yang terbatas untuk keberhasilan proyek perubahan.

Selain pengembangan diri yang langsung terkait proyek perubahan, pengembangan diri yang telah dilakukan diantaranya:

1. Menghadiri *Side Event Tackling AMR: Curbing The AMR Pandemic* di Bali Tanggal 24 Agustus 2022. Pada tahun 2016, dirilis sebuah laporan global *review* perkembangan resistensi antimikroba, laporan tersebut menggambarkan model simulasi dimana kejadian resistensi antimikroba diprediksi akan menjadi pembunuh nomor 1 di dunia pada tahun 2050, dengan tingkat kematian mencapai 10 juta jiwa per tahun, dan kematian tertinggi terjadi di kawasan ASIA. Gambaran ini akan mungkin terjadi jika saat ini masyarakat internasional tidak memiliki upaya yang konkrit dalam pengendalian penggunaan antimikroba. Maka dari itu, Dunia sedang dalam merealisasikan resolusi global yang diterjemahkan ke dalam rencana aksi global dalam pengendalian resistensi antimikroba yang mengamanatkan agar setiap negara di dunia menyusun rencana aksi nasional.



Gambar 65. Bersama Wakil Menteri Pertanian dalam *side event tackling AMR: Curbing The AMR Pandemic*

2. Menghadiri *Agricultures Ministry Meeting* G20 di Bali Tanggal 27-29 September 2022. Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) memimpin langsung sidang *Agriculture Ministers Meeting* (AMM) G20, di Hotel InterContinental Jimbaran Bali. AMM G20 Indonesia tak hanya dihadiri oleh menteri pertanian dan perwakilan dari negara-negara G20, tapi juga organisasi internasional di bidang pertanian dan, negara-negara di luar forum G20 yang mendapatkan undangan khusus. SYL mengungkapkan tema Presidensi G20 Indonesia, yaitu *“Recover Together, Recover Stronger”* mencerminkan semangat solidaritas G20 untuk bekerja sama dalam rangka pemulihan ekonomi dari dampak panjang perubahan iklim, disrupsi perdagangan global, dan pandemi Covid-19. Diskusi Kelompok Kerja Pertanian (*Agriculture Working Group/AWG*) untuk memastikan pemenuhan pangan dan gizi bagi masyarakat dunia. Maka tantangan global saat ini menuntut negara-negara di dunia untuk mengambil tindakan segera dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya, untuk mendorong

percepatan transformasi sistem pertanian dan pangan menjadi lebih efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan serta memastikan produksi pangan, gizi, dan lingkungan yang lebih baik.



Gambar 66. Menghadiri AMM G20 di Bali

3. Menghadiri *World Rabies Day* di Bali Tanggal 29 September 2022. Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengendalian rabies dengan melakukan gerakan vaksinasi hewan secara massal, salah satunya digelar di Bali. Gerakan ini dilaksanakan bertepatan pada peringatan Hari Rabies Sedunia. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah menyampaikan pengendalian Rabies dapat sukses bila cakupan vaksinasi HPR minimal telah mencapai 70%. Menurut Nasrullah, saat ini telah terdistribusi 91 ribu dosis vaksin Rabies untuk Bali.



Gambar 67. *World Rabies Day* di Bali

4. Menghadiri 25<sup>th</sup> SEACFMD *National Coordinators Meeting* di Bali 3-5 Desember 2022. Pertemuan SEACFMD merupakan pertemuan yang

sangat penting dalam mendorong program pengendalian PMK khususnya bagi Indonesia sebagai negara anggota yang baru terdampak PMK. Pertemuan SEACFMD ini dihadiri oleh 12 negara anggota SEACFMD, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, China dan Mongolia serta negara-negara tetangga kawasan seperti Timor Leste, Jepang, dan Korea Selatan. Pertemuan SEACFMD berlangsung selama 3 (tiga) hari untuk membahas situasi terkini PMK di masing-masing negara anggota SEACFMD, baik negara tertular maupun yang masih bebas PMK. Tujuan pertemuan ini untuk memberikan informasi mengenai situasi terkini PMK secara global dan regional di antara negara-negara anggota, serta berbagai perkembangan pengendalian di negara masing-masing. Indonesia berharap hasil dari pertemuan ini dapat mengarahkan, sekaligus memberikan rekomendasi terbaik untuk mengendalikan PMK, serta memberikan panduan dalam perjalanan pemberantasan penyakit PMK di Indonesia dan Asia Tenggara serta China. Beberapa link berita terkait kegiatan ini antara lain <http://www.majalahinforet.com/search/label/South-East%20Asia%20and%20China%20Foot%20and%20Mouth%20Disease?&max-results=7>

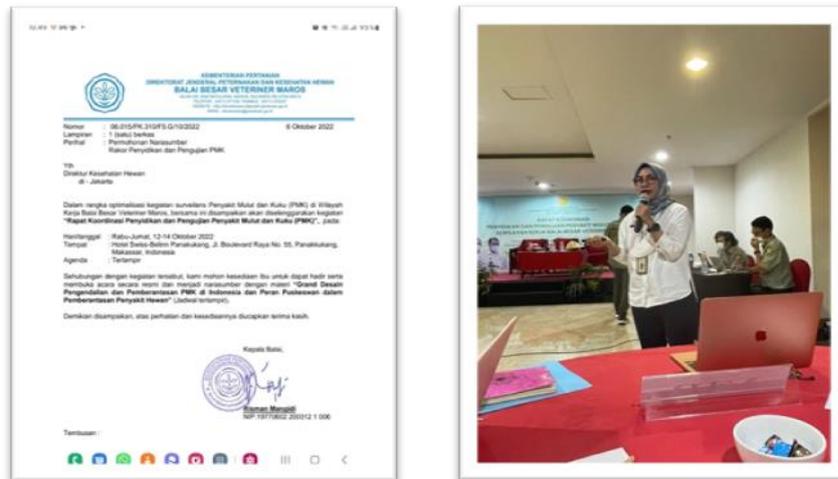


Gambar 68. Foto Bersama para peserta anggota SEACFMD



Gambar 69. Mempresentasikan Kondisi PMK di Indonesia

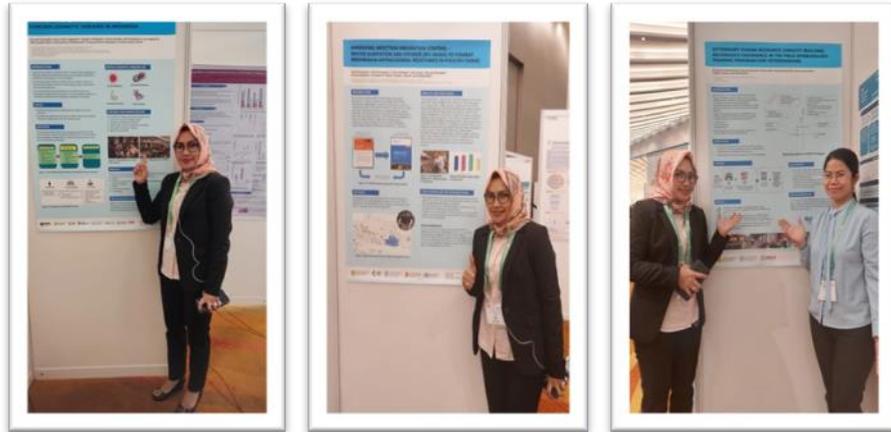
5. Menghadiri Undangan BBVet Maros tentang Sosialisasi Peta Jalan Pembebasan PMK di Indonesia di Makassar tanggal 13 Oktober 2022.



Gambar 70. Undangan BBVet Maros tentang Sosialisasi Peta Jalan Pembebasan PMK di Maros

6. Menghadiri 7<sup>th</sup> World One Health Congress di Singapore tanggal 7-11 November 2022. *Project leader* telah diterima sebagai salah satu presenter untuk mempresentasikan 3 jenis poster yang berjudul:

- I. *Prioritizing of Greatest Nasional Concern Zoonotic Diseases in Indonesia* (Penulis 1);
- II. *Improving Infection Prevention Control-Water sanitation and Hygiene (IPC-Wash) to Combat Indonesian Antimicrobial Resistance in Poultry Farms* (Penulis 1);
- III. *Veterinary Human Resource Capacity Building Indonesia's Experience in The Field Epidemiology Training Program For Veterinarians* (Penulis 2).



Gambar 71. Presentasi Poster di *7<sup>th</sup> World One Health Congress*

7. Berkesempatan menyampaikan kondisi Indonesia terkait wabah PMK Kepada Direktur Jenderal Badan Kesehatan Hewan sedunia (WOAH) *Dr. Monique Eloit*.



Gambar 72. Menyampaikan kondisi Wabah PMK kepada Direktur Jendral Badan Kesehatan Hewan sedunia (WOAH) *Dr. Monique Eloit*.

8. Menghadiri audiensi dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura tanggal 10 November 2022 di Singapura.



Gambar 73. Mendampingi Dirjen PKH melakukan audiensi dengan Dubes Indonesia untuk Singapura Petahana Suryopratomo

9. Menghadiri *Bilateral meeting* dengan *Singapore Food Agency* dalam rangka pembahasan akselerasi ekspor Produk Peternakan Indonesia ke Singapore Tanggal 11 November 2022.



Gambar 74. Mendampingi Dirjen PKH melakukan *bilateral meeting* dengan Deputi *Singapore Food Agency* dalam rangka percepatan ekspor unggas ke Singapore

10. Menghadiri **APHCA 43<sup>rd</sup> Business Meeting & Quarterly APHCA Executive Committee** di Singapore 11 November 2022. Pertemuan APHCA (*animal production and Health Committee for Asia Pasific*) FAO adalah pertemuan rutin untuk membahas kerangka kerja Produksi ternak dan Kesehatan Hewan. Dalam pertemuan ini *Project Leader* mendampingi Dirjen PKH untuk mengusulkan beberapa focus yang menjadi agenda APHCA. **Rekomendasi Indonesia antara lain:**

**A. Priority technical areas for APHCA's mission (based on rank)**

1. *Animal health*
2. *Animal production*
3. *Antimicrobial resistance*
4. *One Health*
5. *Food safety*
6. *Health of the environment*
7. *Wildlife*
8. *Biodiversity*

**B. Strategic objectives of APHCA (based on rank)**

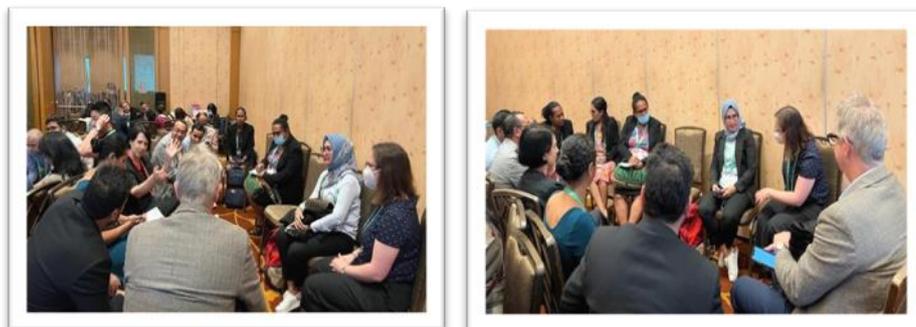
1. *Promote general development and national/international action and technical capacity building in animal husbandry and health problems.*
2. *Promote livestock production as an industry and as part of the farming system on the basis of self-reliance at the farm level.*
3. *Improve rural livestock agriculture and resource development through disease eradication, enhanced services and inputs, organizational efficiency, diversification of farm production and rural cooperation.*
4. *Enhance livestock industry and trade so as to bring direct benefit to rural communities and improve their quality of life.*
5. *Raise nutrition levels and living standards of small farmers and rural communities through the optimal exploitation of potential resources for livestock development.*

6. *Develop livestock as an integral part of agriculture through programmes relevant to Asia's farming systems promoting climate-smart livestock production.*
7. *Support small farmers and the harmonious integration of crop, livestock, poultry and fish production so as to maximize agricultural production in smallholdings.*
8. *Build up regional and national livestock cooperation based on collective self-reliance and mutual assistance within the region.*



Gambar 75. Menghadiri APHCA 43<sup>rd</sup> *Business Meeting & Quarterly APHCA Executive Committee*

11. Pertemuan *Flemming Fund Fellowship* Tanggal 10 November 2022 di Singapore. *Project Leader* sejak Tahun 2021 mendapatkan beasiswa dari *flemming fund Foundation* untuk *Policy Fellowship* terkait *antimicrobial resistance*. Para penerima beasiswa mengadakan pertemuan untuk mengupdate sejauh mana *proyek policy fellow* telah dikerjakan di negara masing masing para penerima beasiswa.



Gambar 76. Pertemuan *Flemming Fund Fellowship*

12. Mengikuti “Kepoin Potensi Dirimu”

Mengikuti kegiatan pengembangan diri secara virtual dengan tema “Kepoin Potensi Dirimu, Maksimalkan Kinerjamu” yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 29 Oktober 2022 dengan narasumber DR. Wahyu Suprapti, MM, MPSIT.



Gambar 77. Mengikuti kegiatan pengembangan diri secara virtual

Dari kegiatan tersebut, dapat mengetahui potensi diri kita dan bagaimana saran pengembangannya untuk meningkatkan kinerja kita. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui posisi individu kita dan bagaimana memanfaatkan potensi yang ada dan bagaimana mengembangkannya berdasarkan kelemahan yang ada

13. Sebagai Pembicara International dalam kegiatan *Launch of The AMR Multi stakeholder Partnership Platform* untuk memperingati *World Antimicrobial Awareness Week (WAAW)*.



Gambar 78. Pembicara International dalam kegiatan *Launch of The AMR Multi stakeholder Partnership Platform*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Pembelajaran Kepemimpinan

Proyek Perubahan merupakan proyek yang implementatif dan manfaatnya dapat langsung dirasakan/digunakan bagi Institusi Kementerian Pertanian, Kementerian/Lembaga Lain. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menyusun Peta Jalan (*roadmap*) Pemberantasan PMK tahun 2023-2035 menuju Indonesia Bebas PMK. Peta jalan disusun berdasarkan analisis kondisi PMK yang terjadi saat ini, analisis terhadap penanggulangan PMK yang telah dilakukan serta *best practices* pengendalian PMK yang dilakukan oleh negara lain. Strategi Pemberantasan PMK disusun berdasarkan *the global FMD strategy* yang dikeluarkan oleh organisasi Kesehatan hewan dunia (WOAH). Strategi Pemberantasan PMK juga divalidasi oleh pakar kesehatan hewan maupun peternakan melalui *desk review* dan serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil formulasi strategi kemudian dijabarkan menjadi kerangka logis Peta Jalan Pemberantasan PMK tahun 2023-2035, visi, misi, strategi, kegiatan hingga rencana aksi pemberantasan PMK.

Dengan waktu dan sumber daya yang terbatas dalam penyelesaian proyek jangka pendek ini maka menuntut kompetensi dari seorang *Tim Leader*. Sebagai *Tim Leader* harus memiliki kemampuan:

- a. Individu (teknis) dan kemampuan manajerial;
- b. Komunikasi baik dengan internal maupun eksternal melalui pertemuan resmi maupun tidak resmi agar proyek perubahan dapat dipahami/dimengerti sehingga mendapat dukungan;
- c. Berpikir lebih strategis;
- d. Menganalisa lingkungan dan pemetaan masalah;
- e. Memimpin tim efektif yang memiliki keahlian yang beragam;
- f. Mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik;
- g. Memotivasi tim efektif untuk tetap berkomitmen bekerja dan menyelesaikan tahap demi tahap dari rencana jangka pendek.

Pencapaian tersebut tidak dapat terpisahkan dari kemampuan manajemen organisasi dan melibatkan K/L terkait.

Pelaksanaan peta jalan pemberantasan PMK tahun 2023-2035 ini merupakan upaya strategis yang dilakukan dalam mewujudkan pembangunan nasional, *Ultimate outcome* yang ingin diwujudkan adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi pemberantasan PMK terhadap komponen PDB.

## B. Kesimpulan

1. Proyek perubahan ini merupakan bukti kompetensi reformer dalam kepemimpinan strategis. Reformer mengambil judul: Peta Jalan Pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional Tahun 2023-2035 – PELABAS PMK yang telah di laksanakan selama 2 bulan dari tanggal 23 September sd tanggal 21 Nopember 2022.
2. Luaran (*output*) yang telah dicapai pada pelaksanaan proyek perubahan ini sebanyak 10 kegiatan jangka pendek antara lain 1). Pembentukan Tim Efektif; 2). *Kick of Meeting*; 3). Analisis penanggulangan PMK yang sudah dilakukan sampai saat ini; 4) Analisis *bench marking* terhadap *best practice* penanggulangan PMK di Negara lain; 5) *Expert judgement* penanggulangan PMK di Indonesia; 6) Identifikasi Standar International Penanggulangan PMK berdasarkan WOAHA (*World Organization Animal Health*); 7). Menentukan Program, kegiatan, sub Kegiatan serta indicator keberhasilan pemberantasan PMK; 8). Finalisasi peta jalan pembebasan PMK Nasional Tahun 2023-2035; 9) Sosialisasi Peta Jalan dan 10). Penetapan Surat Keputusan Menteri Pertanian.
3. Strategi *marketing* yang digunakan pada proyek perubahan ini adalah publikasi dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan baik di lingkup Kementerian Pertanian, K/L stakeholder terkait lainnya. Kegiatan publikasi, sosialisasi dan penderasan informasi dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus dilakukan dan ditingkatkan agar dapat memberikan

pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik terhadap Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional Tahun 2023-2035.

4. Sebelum adanya proyek perubahan ini, belum ada sama sekali peta jalan didalam pengendalian PMK secara nasional dan dengan adanya proyek perubahan ini maka sudah ada peta jalan pembebasan PMK Nasional tahun 2023-2035 beserta strategi keluarannya.
5. Organisasi pembelajaran yang dilakukan dalam penyusunan proyek perubahan ini telah diterapkan mulai dari bagaimana mengumpulkan data, informasi dan pengetahuan bagi organisasi yang berasal dari pengalaman dari organisasi tersebut dalam mengumpulkan data, informasi dan jejaring kerja yang dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi dan meningkatkan kapasitas organisasi dalam menyelesaikan tugas organisasi dari pimpinan dan pelayanan terhadap kepentingan publik terutama dalam penyelesaian proyek perubahan Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional Tahun 2023-2035.
6. Manfaat yang didapat dari proyek perubahan ini adalah menyediakan peta jalan pembebasan PMK Nasional Tahun 2023-2035 bagi kementerian Pertanian, K/L terkait, asosiasi, akademisi dan para peternak.
7. Kepemimpinan strategis dalam proyek perubahan ini adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya manusia, material dan kapital untuk mencapai tujuan dimana pada proses pelaksanaan ditemukan masalah dan tantangan yang harus dapat diselesaikan agar luaran (*output*) yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Karakter dan sifat dari pemimpin akan sangat berpengaruh kepada tim efektif, dan para pemangku kepentingan, oleh karena itu pemimpin harus mampu memberikan arah yang jelas dan pengaruh positif pada proyek perubahan ini.
8. Mata kuliah pilihan terkait proyek perubahan ini adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pembangunan

pertanian berkelanjutan dan peningkatan pelayanan publik. Mata kuliah pilihan tersebut dapat mendukung dan memperkaya proyek perubahan yang telah dilakukan.

9. Manfaat dari potensi pengembangan diri pada proyek perubahan ini adalah memberikan wawasan dan meningkatkan integritas, kerjasama dan bagaimana mengelola perubahan agar dapat memberikan manfaat pada proyek perubahan ini dan pelaksanaan tugas sehari-hari,

#### C. Rekomendasi

1. Setiap proyek perubahan yang sifatnya jangka panjang memerlukan pendampingan-pendampingan sejak awal, baik sosialisasi dan advokasi demi kesuksesan dari program proyek perubahan. Proyek Perubahan berdampak kepada perubahan budaya kerja, untuk itu Komunikasi dan koordinasi baik *internal* maupun *eksternal* merupakan kunci pokok keberhasilan dan harus dipertahankan.
2. Proyek perubahan jangka pendek yang kiranya sudah berhasil dilakukan harus bisa dilanjutkan dengan capaian untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kesemuanya harus didukung dengan anggaran yang jelas dan pembangunan SDM pendukung serta persiapan budaya kerja yang baru tersebut.
3. *Output* capaian jangka pendek merupakan pengungkit untuk keberhasilan target yang akan dicapai dalam proyek perubahan.

#### D. Tindak Lanjut

- Penyelesaian SK Menteri Pertanian tentang Peta Jalan Pemberantasan PMK Nasional Tahun 2023-2035.
- Implementasi jangka menengah dan jangka panjang.
- Eskalasi legal formal ke peraturan yang lebih tinggi setingkat peraturan Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

- Materi Merancang Proyek Perubahan Pada PKN II Angkatan XX, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2022;
- Materi Organisasi yang Adaptif pada PKN II Angkatan XX, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2022;
- Materi Kepemimpinan Kewirausahaan pada PKN II Angkatan XX, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2022;
- Materi Organisasi Pembelajaran pada PKN II Angkatan XX, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2022;
- Materi Marketing Sektor Publik pada PKN II Angkatan XX, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2022;
- Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Tahun 2020
- Stavros, J. M., & Saint, D. (2010). *SOAR: Linking strategy and OD to sustainable performance. Practicing organization development: A guide for leading change*, 3, 377- 394.
- Novita Sari Simamora (2022) "Opini: Kerugian Akibat Penyakit Mulut & Kuku di Indonesia", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220517/12/1533832/opini-kerugian-akibat-penyakit-mulut-kuku-di-indonesia>. [Bisnis.com](https://bisnis.com)



---

Laporan Proyek Perubahan

---



**PETA JALAN  
PEMBERANTASAN**  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU NASIONAL  
Tahun 2023-2035

Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si  
NDH 43